

**PERAN FORUM BANGUN ACEH (FBA) DALAM
PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DEWI CHRISMAWATI

NIM. 160305040

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Sosiologi Agama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

DARUSSALAM - BANDA ACEH

2021 M / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dewi Chrismawati

NIM : 160305040

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Februari 2021

Yang menyatakan,



Dewi Chrismawati
NIM. 160305040

**PERAN FORUM BANGUN ACEH (FBA) DALAM
PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama

Diajukan Oleh

DEWI CHRISMAWATI

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat

Program Studi : Sosiologi Agama

NIM. 160305040

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Musdawati, M.A

NIP .197509102009012002


Suci Fajarni, M.A

NIP . 199103302018012003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata
Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari / Tanggal : Jum'at, 16 Juli 2021 M
6 Zulhijah 1442 H

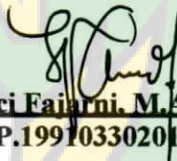
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Musdawati M.A
NIP. 197509102009012002

Sekretaris,




Suci Fajarni M.A
NIP.199103302018012003

Anggota I,



Drs. Taslim H.M. Yasin. M.Si
NIP. 196012061987031004

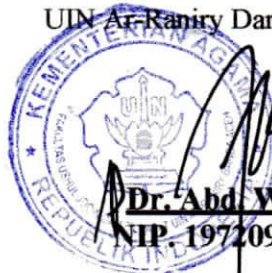
Anggota II,



Dr. Abd Madiid. M.Si
NIP.196103251991011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Abd Wahid M.Ag
NIP. 197209292000031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik dan benar yang berjudul **“Peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam Pemberdayaan Disabilitas di Aceh Besar”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1). Shalawat serta salam tidak lupa pula kepada junjungan Rasulullah SAW. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semuanya tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan yang dengan tulus memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Juara dan Ibunda Bitnawati serta keluarga yang telah memberikan do’a yang tak pernah putus, nasehat, motivasi dan semangat, kasih sayang serta dukungan baik moral maupun material yang tidak terkira.
2. Ibu Musdawati, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Suci Fajarni, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikirannya serta dorongan dan arahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama, Ibu Dr. Juwaini M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik dan seluruh Dosen beserta staf

Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.

4. Forum Bangun Aceh, Erlina Marlinda, dan Ibu Zulvia Maika Letis dari Yayasan Sahabat Difabel Aceh yang telah bersedia memberikan data dan informasi guna mendukung penulisan skripsi ini.
5. Perpustakaan Ushuluddin dan Filsafat beserta karyawannya, dan kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawannya yang telah melayani, memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Willy Hizriani Nasution, Zuhra Savitri, Sadariahta Maha, Sabirin, Marhamah, Lilis Sulistia Ningrum, Nanda Aya Sofia, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Zahraton Aini, Nurmala Fitri, Ainul Mardhiah, Merry Oktaviana, Yuli Shafira, Musdi, Zsa-Zsa Nazadilla, Nova Zahara, Lilis Wanti, Juliana, Mita Zulmiza Aini, Rahayutivani yang telah mendukung dan mendorong dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis atas kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini akan lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Februari 2021

Dewi Chrismawati

PERAN FORUM BANGUN ACEH (FBA) DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI ACEH BESAR

NAMA : Dewi Chrismawati
NIM : 160305040
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Prodi : Sosiologi Agama
Pembimbing I : Musdawati, M.A
Pembimbing II : Suci Fajarni, M.A

ABSTRAK

FBA adalah salah satu lembaga yang fokus terhadap pendampingan kelompok disabilitas melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membentuk modal sosial mereka dengan cara memasukkan mereka ke dalam kelompok sosial yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui isu sosial yang dialami Kelompok Disabilitas di Aceh Besar yang di dampingi oleh FBA serta peran FBA dalam melakukan pemberdayaan terhadap Kelompok Disabilitas di Aceh Besar. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap pengurus FBA dan disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disabilitas di Aceh Besar memiliki persoalan-persoalan stigma, tidak memiliki kepercayaan diri, dianggap sebagai aib keluarga, tidak keluar dari rumah, keluarga malu mempunyai anak disabilitas, dipandang sebelah mata, dianggap sebagai beban, diskriminasi. Kemudian FBA telah melakukan pendampingan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, penguatan individu dan sosial. Meskipun FBA tergolong baru masuk dalam kegiatan untuk kelompok disabilitas, namun mereka telah mampu memberikan penguatan terhadap para disabilitas dan aparat desa tentang posisi disabilitas dalam masyarakat. Disamping itu terdapat hambatan secara internal, yaitu keluarga yang tidak mensupport dan eksternal, yaitu orang pemberi kerja tidak mau menerima disabilitas, bergantinya stakeholder ketika sudah melakukan advokasi awal.

Kata kunci: Pemberdayaan, Disabilitas, FBA (Forum Bangun Aceh)

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 :Data Kecamatan Wilayah Kerja dan Jumlah

Disabilitas 35



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	11
C. Definisi Operasional	17
1. Peran	17
2. Forum Bangun Aceh (FBA).....	18
3. Pemberdayaan	18
4. Disabilitas	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	23
a. Lokasi Penelitian.....	23
b. Subjek Penelitian	24
C. Instrumen Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
a. Observasi.....	25
b. Wawancara.....	25

c. Dokumentasi	26
E. Sumber Data	27
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	30
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian	30
a. Sejarah Berdirinya Forum Bangun Aceh (FBA) di Aceh.....	30
b. Tujuan Forum Bangun Aceh (FBA)	33
c. Visi dan Misi Forum Bangun Aceh (FBA).....	33
d. Program Forum Bangun Aceh (FBA).....	34
e. Hambatan Forum Bangun Aceh (FBA) dalam Melaksanakan Program.....	43
B. Masalah Sosial Disabilitas di Aceh Besar.....	44
1. Permasalahan Individu (pribadi) Disabilitas	45
a) Disabilitas adalah cacat dan rasa percaya diri rendah.....	45
b) Ketergantungan dengan Keluarga	45
c) Kapasitas Rendah Kurang Pendidikan ..	46
d) Miskin.....	47
2. Disabilitas dan Hubungan dengan Keluarga	47
3. Sosial.....	53
C. Peran Forum Bangun Aceh dalam Pemberdayaan Disabilitas di Aceh Besar.....	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian
di Kantor Forum Bangun Aceh (FBA)

Lampiran 3 : Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disabilitas merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari karena keterbatasan yang dimiliki, baik secara fisik maupun mental.¹ Sehingga dalam lingkungannya mereka memiliki hambatan dan kesulitan untuk melakukan aktivitas secara mandiri karena keterbatasan fungsinya. Apabila hambatan yang mereka miliki dapat dihilangkan maka mereka tidak lagi menjadi disabilitas.

Disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam lingkungan sosialnya. Akibatnya, penyandang disabilitas menjadi kelompok rentan dari penerimaan sosial yang utuh. Maksud dari kelompok rentan ini adalah rentan mengalami diskriminasi, mendapatkan stigma/pelemban di dalam masyarakat, menjadi kelompok minoritas yang termarjinalkan.

Penyandang disabilitas sering menghadapi resiko kerentanan karena terbatasnya kebijakan yang terstruktur, massif dan berpihak. Timbulnya resiko tersebut karena adanya asumsi bahwa pendataan jumlah penyandang disabilitas yang belum akurat merupakan salah satu penyebab sering terabaikannya pemenuhan hak mereka yang akhirnya berdampak kepada resiko ketelantaran dan kemiskinan. Para penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam beraktivitas dan masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota yang setara dalam masyarakat serta masih mendapatkan perlakuan diskriminasi

¹ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keahlian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 201.

terhadap pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di segala aspek dalam lintas bidang kehidupan.²

Kebutuhan utama dari penyandang disabilitas adalah sama dengan orang lain, yaitu kehidupan, cinta, pendidikan, pekerjaan, mempunyai kontrol dan pilihan dalam kehidupan seseorang, dan akses untuk pelayanan yang cukup (termasuk medis dan rehabilitasi) yang merupakan suatu hak. Masalah dengan penyandang disabilitas terletak pada bagaimana masyarakat merespon individu dan disabilitas yang dimiliki, kemudian pada lingkungan fisik dan sosial yang dirancang oleh orang-orang non disabilitas untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki masalah disabilitas. Apabila masyarakat dapat menghargai dan menginklusi semua orang tanpa memandang perbedaan individu, membuat perubahan pada hidup mereka menjadi produktif dan berguna.³

Bekerja merupakan suatu cara untuk manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup untuk melanjutkan kehidupannya.⁴ Penyandang disabilitas juga merupakan bagian dalam masyarakat yang berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat kecacatannya, bahkan Pasal 67 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kecacatannya.⁵ Meskipun

² Sulistyio Saputro, dkk, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, (Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial, 2015), hlm. 8-11.

³ Sulistyio Saputro, dkk, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*”, hlm. 19.

⁴ Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (2018), hlm. 70.

⁵ Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”, hlm. 65.

dalam dunia ketenagakerjaan kelompok disabilitas juga masih mengalami diskriminasi.

Kecilnya kesempatan yang diberikan kepada mereka dalam dunia pekerjaan untuk dipekerjakan di suatu instansi/lembaga. Pasal 53 ayat (1) UU No. 8/2016 mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) mewajibkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.⁶ Dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Masih banyaknya gedung-gedung pemerintahan maupun swasta yang belum aksesibel terhadap penyandang disabilitas, tidak hanya itu dari persentase tersebut juga terdapat beberapa kategori pada saat merekrut karyawan.

Tersedianya kesempatan kerja yang sangat kecil tersebut mengharuskan para penyandang disabilitas meningkatkan kecakapan kerja dan kemampuan kerja mandiri melalui pendidikan maupun pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan manajemen para penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mengidentifikasi peluang usaha dan memulai usaha mereka sendiri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 13 ayat (e) menyebutkan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan

⁶ Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang", hlm. 65.

bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁷

Dapat kita lihat bahwa kelompok disabilitas memerlukan dukungan, baik dari pemerintah, masyarakat, lingkungan, maupun komunitas secara penuh untuk melakukan suatu perubahan bagi mereka. Banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap kelompok disabilitas, pada nyatanya mereka sama seperti warga negara lainnya yang harus diberikan hak, dan kesempatan yang sama. Perlakuan tersebut menjadikan kelompok disabilitas menerima berbagai ketidakadilan yang dirasakan di kehidupan sosial.

Banyak lembaga dan komunitas yang bergerak dalam mengupayakan isu-isu disabilitas, salah satunya adalah Forum Bangun Aceh (FBA) yang digerakkan untuk memberdayakan para disabilitas agar dapat mengasah potensi-potensi yang mereka miliki sehingga dapat membantu meningkatkan kehidupannya dan mengangkat martabat kaum disabilitas.

Guna memastikan pelaksanaan upaya pengembangan diri para penyandang disabilitas, Forum Bangun Aceh (FBA) sebagai lembaga Swadaya Masyarakat di Aceh. Sejak 2005 FBA terfokus pada program-program pembangunan berkelanjutan di Aceh dengan prioritas pada pendidikan dan pemberdayaan.⁸

Pada tahun 2016 Salah satu fokus utama pemberdayaan yang dilakukan oleh FBA adalah *Aceh Community Based Inclusive Development* (ACBID) atau pembangunan inklusi disabilitas di Aceh. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh FBA di Aceh Besar menyimpulkan bahwa kerentanan ekonomi dan sosial

⁷ Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Diakses Tanggal 02 Desember 2020 pada Link <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas>

⁸ Syaifullah Puteh, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, (Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020), hlm. 160.

adalah permasalahan utama yang dihadapi mayoritas kelompok disabilitas di Aceh Besar.⁹

Mengatasi permasalahan utama tersebut, FBA berkomitmen dalam mendorong desa yang aksesibilitas dan keberpihakan terhadap disabilitas dengan memberikan harapan baru untuk keluar dari kungkungan stigma negatif dan juga hambatan dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Sehingga dengan program ACBID, FBA dapat meningkatkan kemandirian Disabilitas di Aceh Besar.¹⁰

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, dengan ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap Peran FBA dalam Pemberdayaan Disabilitas di Aceh Besar dan masalah kehidupan sosial disabilitas yang di dampingi oleh FBA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah permasalahan sosial disabilitas di Aceh Besar yang didampingi oleh FBA?
2. Bagaimana peran FBA dalam pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas di Aceh Besar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

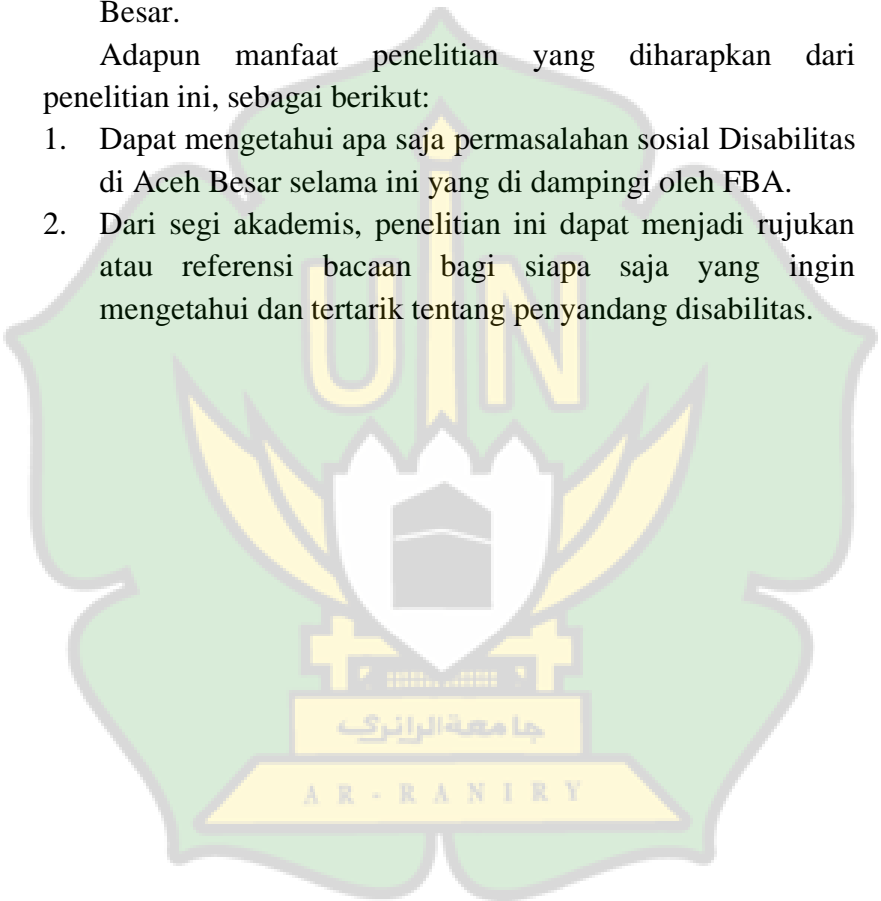
⁹ Syaifullah Puteh, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, hlm. 161.

¹⁰ Syaifullah Puteh, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, hlm. 161.

1. Untuk mengetahui apa permasalahan sosial disabilitas di Aceh Besar yang di dampingi oleh FBA.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya FBA dalam meningkatkan kemandirian disabilitas dengan melakukan pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas sebagai kelompok minoritas dan juga sebagai masyarakat Aceh Besar.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui apa saja permasalahan sosial Disabilitas di Aceh Besar selama ini yang di dampingi oleh FBA.
2. Dari segi akademis, penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan tertarik tentang penyandang disabilitas.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan penelusuran penelitian sebelumnya mengenai disabilitas, dan peran organisasi maupun pemerintah terhadap isu disabilitas. Berikut ini penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya:

Skripsi yang ditulis oleh Utami Rahajeng tahun 2013 dengan Judul “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel dan sejauhmana pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel terlaksana di Kota Yogyakarta ini. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel yang paling mendominasi adalah peran sebagai fasilitator, karena program-program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan lebih banyak mengarah dalam penyediaan dan pemberi fasilitas. Namun, muncul juga peran-peran yang lain yaitu (1) pelayan masyarakat, (2) pendamping, (3) mitra, (4) penyandang dana. Pemenuhan hak pendidikan oleh Dinas Pendidikan untuk kaum difabel dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi melalui Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi. Untuk mendukung penyelenggara pendidikan inklusi tersebut Dinas Pendidikan juga membentuk Forum SPPI, Forum GPK, dan *Resource Center*. Dalam menjalankan perannya ditemukan hambatan-hambatan, yaitu: (1) SDM yang kurang, (2) anggaran yang minim, dan (3) pemahaman yang kurang mengenai

¹¹ Utami Rahajeng, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel” (Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm. Vii.

pendidikan inklusi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka upaya yang dilakukan: (1) Pihak Dinas menjalin kerja sama dengan pihak SPPI untuk pemenuhan SDM, (2) meningkatkan anggaran pendidikan inklusi dalam APBD pada tiap tahunnya, dan (3) sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, fokus masalah dari penelitian tersebut melihat peran pemerintah kota yogyakarta dalam pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel dan sejauhmana pemenuhan hak pendidikan untuk kaum difabel terlaksana. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai peran FBA dalam pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar.

Penelitian Gusti Indah Pratiwi dalam Jurnal yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekan Baru”. Penelitian ini dilakukan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan hak bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara serta menghapus berbagai pandangan dan penilaian buruk terhadap penyandang disabilitas. Studi penelitian ini pada Organisasi Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (OPKPC).¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu melihat disabilitas sebagai kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan sering didiskriminasi dalam kehidupan sosial maupun politik. Maka penelitian ini mencakup hal tentang kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan melalui Organisasi Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (OPKPC). Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai peran FBA dalam pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar melalui kelompok swadaya masyarakat.

Eza yulisnaini tahun 2018 (Skripsi) “Peran *Komunitas Young Voices* Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kota Banda

¹² Gusti Indah Pratiwi, “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekan Baru”, *Jurnal Fisip*, Volume 3, Nomor 1, (2016), hlm. 1.

Aceh”. Untuk menganalisis bagaimana keterlibatan dari *Komunitas Young Voices* dalam pemberdayaan disabilitas di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui dukungan dan tantangan dari *Komunitas Young Voices* dalam pemberdayaan disabilitas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran *Komunitas Young Voices* Dalam Pemberdayaan Disabilitas sudah lumayan baik, dan sesuai apa yang mereka rencanakan dalam mengadvokasikan hak disabilitas, seperti melakukan training komputer bagi remaja disabilitas, melakukan training *Leadership* dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam memberdayakan disabilitas di Kota Banda Aceh. Disisi lain juga terdapat masalah-masalah yang timbul, hal ini tidak terlepas dari minimnya anggaran yang ada pada *Komunitas Young Voices*, sehingga program-program yang akan dijalankan jadi terhambat dan tidak bisa terealisasi semuanya, kurangnya kerja sama dengan lembaga dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaan programnya masih dirasakan tidak tepat sasaran, sulitnya mencari angkatan pemuda disabilitas untuk diajak terlibat langsung dalam organisasi, dan masih banyak masyarakat yang kurang faham terhadap isu disabilitas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian tersebut membicarakan tentang keterlibatan untuk mendukung *Komunitas Young Voice* dalam pemberdayaan disabilitas di Kota Banda Aceh. Sedangkan fokus dalam penelitian ini mengenai peran FBA dalam melakukan pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar.

Penelitian Saifuddin dan M. Zuhri pada Jurnalnya yang berjudul “Kewenangan Pemerintah Aceh Besar Dalam Pemenuhan

¹³ Eza Yulisnaini, “Peran Konunitas Young Voice Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kota Banda Aceh” (Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm. Ix.

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini menginginkan penyandang disabilitas memiliki hak habilitasi dan rehabilitasi guna memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pemerintah Aceh Besar yang memiliki kewenangan dalam pemenuhan hak agar dapat melakukan pelaksanaan hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar karena mereka membutuhkan manfaat kehidupannya agar tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan fokus penelitian sekarang mengkaji mengenai peran FBA dalam pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar agar mereka mendapatkan hak yang sama.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmi tahun 2013 (Skripsi) dengan Judul “Peran Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh Dalam Memberdayakan Anak Tunarungu (Studi di SMALB YPAC Banda Aceh)”. Penelitian ini dilakukan karena anak tunarungu ini adalah anak yang berprestasi dalam keterampilan maupun kesenian sehingga menarik dijadikan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan YPAC Aceh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Kadang-kadang juga masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi anak berkebutuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya dana, fasilitas belum mencukupi, kurangnya tenaga ahli yang khusus melayani anak tunarungu, dan kurangnya partisipasi orang tua si anak terhadap anak-anaknya yang berada di YPAC.¹⁵

¹⁴ Saifuddin, dkk, “Kewenangan Pemerintah Aceh Besar dalam Pemenuhan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nomor 2*, (2019), hlm. 290.

¹⁵ Darmi, “Peran Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh Dalam Memberdayakan Anak Tunarungu (Studi di SMALB YPAC Banda Aceh)” (Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2013), hlm. ix.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu membicarakan tentang peran YPAC Aceh dalam memberdayakan anak tunarungu melalui pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau disebut dengan Sekolah Menengan Atas Luar Biasa (SMALB), ini merupakan salah satu program yang dijalankan YPAC. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai peran FBA dalam pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar berdasarkan permasalahan sosial disabilitas.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K.Merton. Merton mengembangkan paradigma teorinya tahun 1948. Dalam membangun teori sosialnya, ia banyak tertarik terhadap keadaan struktur sosial dan fungsi sosial sebagaimana organisasi kehidupan yang diamati dalam kehidupan sosial di sekelilingnya. Maka teori yang dihasilkannya disebut sebagai teori struktural fungsional.¹⁶

Merton tertarik untuk mengkaji teori sosiologi tentang struktur sosial dan perubahan budaya yang dapat mengantarkan pemahamannya mengenai pranata sosial dan karakter kehidupan pada suatu masyarakat sebagaimana adanya. Oleh karena itu, pengkajian terhadap berbagai subjek sangat diperlukan.¹⁷

Pendekatan fungsional menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. General agreements ini memiliki daya yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial, secara fungsional terintegrasi ke dalam

¹⁶ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 29-39.

¹⁷ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, hlm. 32.

suatu bentuk ekuilibrium. Oleh sebab itu, aliran pemikiran tersebut disebut *integration approach*, *order approach*, *equilibrium approach*, atau *structural-functional approach* (fungsional struktural/fungsionalisme struktural). Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan terhadap bagian yang lain.¹⁸

Asumsi dasarnya ialah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat.¹⁹

Dalam teori ini, Merton menyoroti tiga asumsi atau postulat yang terdapat dalam teori fungsional. Ketiga postulat itu ialah:

1. Kesatuan fungsional dari sistem sosial, adalah suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam tingkat keselarasan atau konsistensi yang memadai tanpa menghasilkan konflik panjang yang tidak dapat diatasi atau diatur.
2. Universalitas fungsional dari sistem sosial, menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah ada memiliki fungsi-fungsi positif.²⁰
3. Indispensability fungsional untuk sistem sosial, menyatakan bahwa semua aspek masyarakat yang distandardisasi tidak hanya mempunyai fungsi-fungsi

¹⁸ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, hlm. 41-42.

¹⁹ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, hlm. 42.

²⁰ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, hlm. 48.

positif, tetapi juga menggambarkan bagian keseluruhan dari cara kerja yang mutlak ada.²¹

Dari ketiga postulat ini bahwa sangat diperlukan untuk menekankan kesatuan dari semua unsur sosial, kestabilan dan harmonis dalam menjalankan fungsi dan struktur yang ada di dalam masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dalam suatu kegiatan sistem karena merupakan bagian penting secara keseluruhan. Sesungguhnya masyarakat ialah bagian dari sistem sosial yang saling berkaitan.

Menurut teori struktural fungsional, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai ada kepada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat, maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian.²²

Perlu diperhatikan bahwa disini lembaga sosial seperti FBA berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai pengetahuan dari pemberdayaan yang telah dilakukan agar mereka dapat menerapkannya sampai ke generasi selanjutnya. Keluarga, berfungsi untuk mengasuh, mendidik, dan menjaga perkembangan anak tanpa terkecuali keluarga yang memiliki anak disabilitas.

Teori fungsional struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Perhatian utama pada fungsional struktural adalah

²¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, hlm. 428.

²² I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*, hlm. 46.

struktur-struktur sosial dan lembaga-lembaga masyarakat berskala besar, antar hubungannya, dan efek-efeknya yang memaksa kepada para aktor. Di dalam teori fungsional ini stratifikasi sosial sebagai hal yang universal dan perlu karena mereka berargumen bahwa tidak ada masyarakat yang pernah tidak terstratifikasi, atau tidak berkelas secara total. Stratifikasi dalam pandangan mereka adalah kebutuhan fungsional. Semua masyarakat membutuhkan sistem demikian, dan kebutuhan itu menghasilkan suatu sistem stratifikasi. Mereka juga memandang bahwa suatu sistem stratifikasi sebagai suatu struktur, yang menunjukkan bahwa stratifikasi mengacu bukan kepada para individu yang ada di dalam sistem stratifikasi itu tetapi lebih tepatnya kepada suatu sistem posisi-posisi. David dan moore menjelaskan bahwa stratifikasi adalah “perlengkapan yang berevolusi secara tak sadar”. Perlengkapan ini ada dan harus ada dalam setiap masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup. Fokus isi utama fungsional ialah cara suatu masyarakat memotivasi dan menempatkan orang-orang di dalam posisi-posisi “yang tepat” di dalam sistem stratifikasi.²³

Struktur sosial merupakan unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat untuk membentuk suatu hubungan dan menyatukan kelompok sosial. Pada saat berada di dalam masyarakat setiap individu maupun kelompok selalu menghadapi yang namanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan hal universal yang ada di dalam masyarakat. Dimana pada saat melakukan sebuah interaksi, maka fungsi sosial itu sudah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Semua masyarakat membutuhkan sistem ini, termasuk disabilitas. Disabilitas juga merasakan langsung stratifikasi sosial yang dialami dalam masyarakat, mereka termasuk ke dalam lapisan masyarakat kelas bawah. Sehingga mereka membutuhkan lembaga-lembaga masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kelas sosial mereka agar dapat memotivasi dirinya sendiri dan

²³ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 402-403.

menempatkan mereka di dalam posisi yang tepat pada sistem stratifikasi. Hadirnya lembaga FBA ini membawa pengaruh baik bagi disabilitas dimana mereka mempunyai fungsi untuk memfasilitasi sarana dan prasarana terhadap disabilitas agar mereka dapat mandiri dan inklusif. Dimana mereka melakukan pemberdayaan dan membangun KSM di desa dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.

Struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologi yang sering terjadi di dalam masyarakat. Pada teori fungsional struktural Robert K. Merton ini memiliki konsep fungsi, disfungsi dan non fungsi.

Konsep fungsi ini didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang dibuat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu. Sedangkan konsep disfungsi ini untuk melihat konsekuensi-konsekuensi yang bersifat negatif terhadap suatu sistem sosial. Kemudian konsep nonfungsi yang didefinisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-bener tidak relevan dengan sistem yang dipertimbangkan. Merton juga memperkenalkan konsep fungsi nyata dan laten. Kedua istilah ini menjadi tambahan penting bagi analisis fungsional. Fungsi nyata adalah yang disengaja, sementara fungsi laten adalah tidak sengaja.²⁴

Dari ketiga konsep fungsi yang sudah dicantumkan diatas, dalam melakukan sistem sosial yaitu adanya hubungan yang saling mempengaruhi terhadap individu dengan individu lainnya. Konsep fungsi ini sudah membuktikan bahwa FBA dan disabilitas sudah saling mempengaruhi untuk membuat disabilitas menjadi berdaya dan mandiri melalui program yang sudah FBA lakukan untuk mereka. Buktinya sudah ada kelompok disabilitas yang saat ini bekerja dengan mandiri dan masyarakat juga sudah peduli

²⁴ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, hlm. 429-434.

terhadap kehadiran disabilitas. Tidak hanya itu, FBA juga sudah berhasil membuat desa yang inklusi.

Konsep fungsi nyata ini adalah konsep sosial yang disadari, seperti FBA dan keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi, mendukung, menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan konsep laten adalah fungsi yang tidak nampak atau tidak diharapkan masyarakat, seperti untuk menutupi rasa malu keluarga dari anggapan yang menyatkan bahwa disabilitas aib, dosa keluarga, dan sebagainya.

Sejak awal Merton menjelaskan bahwa analisis fungsional-struktural berfokus pada kelompok-kelompok, organisasi, masyarakat-masyarakat, dan kebudayaan-kebudayaan. Dia menyatakan bahwa setiap objek yang dapat ditundukkan kepada analisis fungsional struktural harus “menggambarkan suatu item yang di standarkan” (yakni terpola dan berulang). Dia memaksudkan hal-hal seperti “peran-peran sosial, pola-pola kelembagaan, proses-proses sosial, pola-pola budaya, emosi-emosi yang terpola secara budaya, norma-norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, alat-alat pengendalian sosial dan sebagainya.”²⁵

Dalam menjelaskan lebih jauh teori fungsional, Merton menunjukkan bahwa suatu struktur mungkin disfungsional bagi sistem sebagai suatu keseluruhan namun hal itu dapat terus berlanjut. Orang mungkin mengajukan alasan yang baik bahwa diskriminasi terhadap kulit hitam, perempuan, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya disfungsional bagi masyarakat Amerika, namun diskriminasi tetap ada karena berfungsi bagi sebagai sistem sosial itu: misalnya, diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya fungsional bagi laki-laki. Akan tetapi, bentuk-bentuk diskriminasi itu bukan tanpa sejumlah disfungsi,

²⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, hlm. 428.

bahkan bagi kelompok yang mendapat manfaatnya. Laki-laki menderita akibat diskriminasi terhadap perempuan, demikian pula kulit putih dirugikan oleh perilaku diskriminasi mereka terhadap kulit hitam. Orang dapat menyatakan bahwa bentuk-bentuk diskriminasi itu sebaliknya memengaruhi pihak pelaku diskriminasi karena menghasilkan banyak orang kurang produktif dan meningkatkan kemungkinan konflik sosial.²⁶

Diskriminasi bagi masyarakat Amerika tidak berfungsi, namun diskriminasi tetap ada karena sistem sosial itu berfungsi berdasarkan identitas sosial budaya seseorang sebagai bentuk sikap dan perilaku yang membedakan atau menghalangi hak-haknya atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik. Salah satu yang mengalami diskriminasi disebutkan adalah kelompok-kelompok minoritas lainnya. Berarti dalam hal ini disabilitas yang menjadi kelompok minoritas di dalam masyarakat kerap mengalami diskriminasi karena kedisabilitasnya. Karena mereka mengalami diskriminasi pada akhirnya mereka tidak dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik di dalam masyarakat, baik itu dari persoalan interaksi sosial sehingga mereka tidak ingin keluar dari rumah dan stigma-stigma itu akan muncul. Disabilitas yang mengalami diskriminasi membuat mereka kurang produktif, karena lingkungan yang membatasi struktur dan fungsi-fungsinya.

C. Definisi Operasional

1. Peran

Peran (*Role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Dimana seseorang menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka mereka telah melaksanakan suatu peran.

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*, hlm. 435.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling ketergantungan, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap individu yang diharapkan banyak orang untuk memenuhi tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai status atau kedudukan yang dimiliki. Adapun, peran yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar.

2. FBA (Forum Bangun Aceh)

Forum Bangun Aceh (FBA) merupakan lembaga non pemerintah, sifatnya kemandirian dan percaya diri para penyandang disabilitas di wilayah Aceh Besar, dan mereka hanya bekerja di 6 wilayah kecamatan.²⁸ FBA merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang menyuarakan dan melakukan advokasi isu disabilitas dengan cara melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap disabilitas.

3. Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (powerless). Ketidakberdayaan memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tersebut mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.²⁹

²⁷ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 158-159.

²⁸ Wawancara dengan Nurul Asyura, Bidang Project Coordinator ACBID Forum Bangun Aceh, tanggal 17 Desember 2020 di Kantor FBA

²⁹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 48.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki.³⁰

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan pada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.³¹

Menurut Persons, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.³²

Menurut Slamet, ia menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu dalam hal ini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil

³⁰ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hlm. 49.

³¹ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hlm. 49.

³² Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hlm. 49.

keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.³³

Forum Bangun Aceh (FBA) melakukan pemberdayaan kepada disabilitas agar mereka menjadi orang yang terberdaya, keluar dari permasalahan yang dihadapinya, dan sebagainya. Fokus utama FBA dalam pemberdayaan ini adalah disabilitas, namun mereka melibatkan semua pihak yang ada di dalam lingkungan masyarakat agar memperkuat sikap toleransi.

4. Disabilitas

Menurut kamus besar bahasa indonesia, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas dalam kata bahasa indonesia berasal dari kata serapan yang artinya adalah cacat atau ketidak mampuan.³⁴

Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, intelektual, mental, dan penyandang disabilitas sensorik.³⁵ Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.³⁶

Terdapat beberapa klasifikasi yang mengalami ragam disabilitas ini adalah:

³³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, hlm. 49-50.

³⁴ Ekawati Rahayu Ningsih, "Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian maupun Pengabdian pada Masyarakat di STAIN Kudus", *Jurnal Penelitian Nomor 1*, (2014), hlm. 77.

³⁵ ³⁵ Ari, dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 9

³⁶ Doni Aji Priyambodo, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja)" (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 21.

- 1) Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan pada indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua yaitu:
 - a) Buta total
 - b) Masih mempunyai sisa penglihatan
- 2) Tunarungu, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
- 3) Tunawicara, ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
- 4) Tunagrahita, yaitu keterbelakangan mental.
- 5) Tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan.
- 6) Tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
- 7) Berkesulitan belajar.
- 8) Lamban belajar.
- 9) Autis, yaitu gangguan perkembangan pervasif dengan gangguan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, interaksi sosial dan memiliki gangguan motorik.
- 10) Tunaganda, yaitu orang yang memiliki kelainan pada fisik dan mental.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki hambatan karena keterbatasan yang mereka miliki dalam beraktivitas di lingkungan dan pembatasan partisipasi yang dialami dalam situasi kehidupan.

Perlindungan dan jaminan hak seharusnya tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan agar mereka

³⁷ Ari, dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 9-10

juga dapat menikmati kesetaraan hak yang seharusnya mereka miliki sama seperti warga negara lainnya.

Diskriminasi seharusnya tidak terjadi lagi terhadap Kelompok Penyandang Disabilitas karena telah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya: 1) Hak untuk hidup; 2) Bebas dari stigma; 3) Privasi; 4) Keadilan dan perlindungan hukum; 5) Pendidikan; 6) Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; 7) Kesehatan; 8) Politik; 9) Keagamaan; 10) Keolahragaan; 11) Kebudayaan dan pariwisata; 12) Kesejahteraan sosial; 13) Aksesibilitas; 14) Pelayanan publik; 15) Perlindungan dari bencana; 16) Habilitasi dan rehabilitas; 17) Konsesi; 18) Pendataan; 19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; 20) Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; 21) Berpindah tempat dan berkewarganegaraan, dan; 22) Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.³⁸

³⁸ Muhamad Ikhsan Kamil, “ Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang” (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018), hlm. 11-12.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.³⁹ Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami sosial dari pandangan pelakunya dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses terjadinya peristiwa yang dialami oleh subjek penelitian. Berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁴⁰

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan letak dimana penelitian akan dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Forum Bangun Aceh (FBA) yang beralamat di Jl. Tengku Abdurrahman No. 50, Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Forum Bangun Aceh (FBA) dengan alasan sebagai berikut:

- a) Forum Bangun Aceh merupakan lembaga non pemerintah yang memperjuangkan isu-isu disabilitas melalui program ACBID.
- b) Sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat sosial, penulis tertarik melakukan penelitian ini ingin mengetahui lebih

³⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan (Metode dan Paradigma Baru)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 140.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 161.

mendalam peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam melakukan pemberdayaan terhadap disabilitas selama ini.

b. Subjek Penelitian

Teknik yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini ialah teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan dan memilih informan yang memiliki karakteristik tertentu terhadap objek yang diteliti. Dimana pandangan yang telah ditetapkan oleh penulis dalam menunjuk informan merupakan orang yang lebih memahami dan mengerti terhadap fenomena yang diteliti. Sehingga penentuan kategori partisipan yang tepat oleh penulis akan memperoleh data atau informasi berdasarkan kajian literatur yang ada.⁴¹ Adapun informan yang menjadi subjek penelitian adalah :

1. Program Manager Forum Bangun Aceh (1 orang)
2. *Project Coordinator* ACBID Forum Bangun Aceh (1 orang)
3. Staf petugas lapangan (*Community Organizer*) Forum Bangun Aceh (5orang)
4. Erlina Marlinda (Disabilitas/ Advocacy Officer di Forum Bangun Aceh)
5. Zulvia Meika Letis (Yayasan Sahabat Difabel Aceh)

Fokus analisis pada peran FBA dalam pemberdayaan terhadap disabilitas di Aceh Besar.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian (masalah) dan menguji hipotesis yang diperoleh melalui instrumen. Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagai mana adanya.⁴²

⁴¹ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 297.

⁴² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 155.

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah handphone, kamera, buku tulis, dan pulpen. Handphone digunakan untuk merekam suara informan, kamera digunakan untuk mengambil gambar sebagai data dokumentasi, buku dan pulpen digunakan untuk mencatat semua informasi yang diberikan oleh informan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, karena mempengaruhi metode pengumpulan data yang digunakan.⁴³

a. Observasi

Observasi adalah mengamati obyek penelitian dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian secara langsung. Observasi dapat dilakukan oleh peneliti secara terbuka maupun terselubung.⁴⁴

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan secara langsung, dimana dalam melakukan wawancara itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi dari yang terwawancara.⁴⁵

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 174.

⁴⁴ Salim & Syahrums, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114 & 117

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 186.

Dalam kegiatan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan cara bertatap muka langsung secara terbuka dan mendalam. Hal ini sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti.⁴⁶ Metode ini memberikan pertanyaan menyangkut objek kajian kepada informan dengan mempersiapkan instrumen wawancara terlebih dahulu yang berupa daftar instrumen dan alat untuk melakukan wawancara, yaitu alat perekam *tape recorder* agar hasil wawancara dapat diperoleh secara menyeluruh dan utuh.

Dalam hal ini saat melakukan penelitian, penulis meminta keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh FBA dalam mengoptimalkan perannya melakukan pendampingan pemberdayaan terhadap disabilitas agar mereka dapat berdaya, mandiri, cerdas, dan sejahtera. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terstruktur. Adapun informan yang diwawancarai adalah Pengurus FBA, Disabilitas, dan Pengurus Yasda. Diharapkan akan mendapatkan informasi dan data, baik dalam bentuk literatur atau apapun yang dapat mendukung penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dari sejumlah data berupa fakta besar yang terdapat dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Kemudian data yang tersedia dapat berbentuk dalam arsip-arsip, mencari beberapa buku-buku referensi, foto dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi.⁴⁷ Dalam kegiatan penelitian ini, penulis

⁴⁶ Agustinus Bandur, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*, hlm. 108.

⁴⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan (Metode dan Paradigma Baru)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 171.

akan mengumpulkan berbagai dokumen penting yang berkaitan dengan objek kajian penelitian untuk menguatkan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber yang bersangkutan.

E. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sebagai pendukung hasil penelitian. Maka, pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian kepada peneliti. Data primer dapat diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan, dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah program manager FBA, *project coordinator* ACBID Forum Bangun Aceh, staf petugas lapangan FBA (*Community Organizer*), Erlina Marlinda (Disabilitas/Relawan di Forum Bangun Aceh), dan Zulvia Meika Letis (Yayasan Sahabat Difabel Aceh).
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder sebagai data yang digunakan untuk membantu dalam mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku, lewat orang lain atau dokumen-dokumen, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat hasil penelitian.⁴⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok, yaitu tema yang di ditemukan pada data-data,

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

dan seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema.⁴⁹ Pada analisis data kualitatif menuntut peneliti untuk mencari dan mendalami permasalahan yang dikaji. Sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵⁰

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif yang disebutnya sebagai model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis data, sehingga peneliti dapat memilih atau menyaring bagian data yang tidak diperlukan/tidak relevan dengan tema yang ditelitinya. Sehingga, memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang telah diperoleh untuk menarik kesimpulan akhirnya dan melakukan verifikasi.⁵¹

a. Reduksi Data

Langkah ini merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dengan pemetaan ini dapat mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah ini menghubungkan hasil-hasil penelitian dengan teori yang berlaku dan mencari hubungannya. Menyusun pengumpulan data yang dilakukan terus menerus agar data terorganisir, sehingga dapat memudahkan untuk dipahami.

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 192.

⁵⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah Nomor 33*, (2018), hlm. 84.

⁵¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 148-152.

c. Verifikasi Data

Dalam langkah ini analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap selanjutnya. Tetapi bila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵²



⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247-252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Forum Bangun Aceh (FBA) di Aceh

Forum Bangun Aceh (FBA) adalah sebuah lembaga NGO non-pemerintah berbentuk yayasan di Aceh. Forum Bangun Aceh (FBA) berdiri pada tahun 2005 pasca tsunami. Awal terbentuknya Forum Bangun Aceh (FBA) sebagai sebuah perkumpulan relawan untuk memberikan bantuan tanggap darurat atas terjadinya musibah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004.⁵³

Pasca tsunami, Forum Bangun Aceh (FBA) didirikan sebagai respon terhadap tsunami untuk membantu masyarakat Aceh, keluarga, dan bergerak membantu masyarakat yang terdampak, terutama korban tsunami dan konflik di Aceh. Forum ini merupakan forum relawan, dimana anggotanya disiasi dan dimotori oleh pembina yang bernama Azwar Hasan.⁵⁴

Pada bulan Februari tanggap darurat terhadap korban tsunami telah selesai yang beranggotakan para relawan, kemudian mereka tidak kembali bekerja untuk Forum Bangun Aceh (FBA) melainkan bekerja untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lain. Forum Bangun Aceh (FBA) pada saat itu tidak berbadan hukum karena berbentuk relawan, sehingga bantuan masih terus datang ke Forum Bangun Aceh (FBA).⁵⁵

⁵³ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

Azwar Hasan sebagai pendiri dan juga orang yang paling paham tentang konteks pembangunan, ingin Forum Bangun Aceh (FBA) menjadi sebuah lembaga formal. Berdasarkan hasil yang telah disepakati menjadikan Forum Bangun Aceh (FBA) sebagai yayasan. Pada awal februari salah seorang dari Irlandia memberikan bantuan lifelihood, kemudian disusul dengan lembaga donatur lainnya seperti Diakonie Katastrophenhilfe, AJWS, DFW, Dublin Port Co dan AusAid, dan CBM. Banyaknya kepercayaan dari berbagai pihak, mereka tidak ingin menghilangkan kepercayaan tersebut begitu saja. Pada akhirnya mereka belajar cepat, bergerak cepat, bertindak bagus, dan berfikir agar tetap membantu masyarakat dan staf juga bisa terberdaya, artinya mempunyai kemampuan, dan lembaga ini tetap terus berjalan.⁵⁶

Melalui kemitraan dengan lembaga donatur sebelumnya yang telah membantu mereka dan bantuan yang datang dari relawan-relawan, maka program mereka mulai menyebar. Program Forum Bangun Aceh (FBA) pertama kali ialah lifelihood dan bantuan pendidikan. Forum Bangun Aceh (FBA) membentuk kelompok kemudian memperkenalkan lifelihood dengan program dana bergulir (*revolving fund*), kelompok disini seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan mempunyai program pemberdayaan individu berupa dana bergulir yang menjangkau 9 kabupaten.⁵⁷

Pada bidang pendidikan, Forum Bangun Aceh (FBA) memberikan bantuan tanggap darurat pendidikan dari Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya sampai Pulo Aceh. Forum Bangun Aceh (FBA) juga membangun sekolah dan peralatannya, bantuan dasar untuk sekolah darurat, memberikan beasiswa, mengirimkan siswa dan guru ke Australia dengan bekerjasama pada sebuah lembaga

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

pendidikan IBO Singapura. FBA dan IBO memfasilitasi semuanya mulai dalam tahapan seleksi, peningkatan kapasitas, sampai keberangkatan ke Australia. Bahkan 2 siswa di Aceh diberikan beasiswa penuh sampai selesai SMA oleh sekolah di Australia. Berdirinya pendidikan anak usia dini (PAUD) Nizamiya pada tahun 2014 merupakan bentuk pencapaian untuk keberlangsungan pendidikan Forum Bangun Aceh (FBA) yang berada di lingkungan kantor tersebut. Sekolah yang dibangun merupakan sekolah yang inklusif, artinya semua kalangan dapat mengaksesnya tanpa terkecuali.⁵⁸

Seiring berjalannya waktu, Forum Bangun Aceh (FBA) tidak bergerak di dunia *emergency* (tanggap darurat), tetapi sudah bergerak pada dunia pembangunan. Pada saat Fakhurrrazi sebagai program manager ekonomi, secara operasional FBA sudah besar dan sudah memiliki beberapa project yang telah dilaksanakan sampai menjangkau 9 kabupaten dengan program pemberdayaan ekonomi. Disamping itu, Forum Bangun Aceh juga mempunyai program PRB (Penanggulangan Resiko Bencana) termasuk di dalamnya adalah tanggap darurat pada saat bencana. Setiap tahunnya mereka menggelontarkan dana untuk tanggap darurat apabila terjadi bencana, terutama di Aceh. Sekmentasi yang diberikan berbeda-beda ketika mereka turun tangan dalam menanganinya, ada yang targetnya keluarga miskin, disabilitas.⁵⁹

Pasca tsunami, banyak NGO yang bergerak di bidang konstruksi, pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan Forum Bangun Aceh (FBA) dari pertama berdiri hingga sekarang hanya fokus terhadap ekonomi dan pendidikan. Sekarang ini Forum

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

Bangun Aceh (FBA) dikelola oleh badan eksekutif yayasan, maka direktornya sudah menjadi direktur eksekutif.⁶⁰

b. Tujuan Forum Bangun Aceh (FBA)

Awal sekali Forum Bangun Aceh (FBA) hadir, mereka ingin membangun masyarakat Aceh dengan bersumberdaya yang mereka miliki. Fungsi Forum Bangun Aceh (FBA) sebagai lembaga swadaya masyarakat hanya memfasilitasi agar masyarakat Aceh dapat mandiri, inklusif. Forum Bangun Aceh (FBA) memfasilitasi perubahan di masyarakat bukan sebagai aktor yang 100% memberikan bantuan.⁶¹

Tujuan program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk orang dengan disabilitas di Aceh ialah meningkatkan taraf hidup mereka dan menurunnya tingkat kemiskinan laki-laki dan perempuan disabilitas di Aceh.⁶² Salah satunya adalah memfasilitasi terbentuknya kelompok swadaya masyarakat, penguatan dan peningkatan kapasitas lokal motivator, pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan mata pencaharian berbasis potensi lokal, pendampingan dan akses terhadap permodalan bagi para usaha mikro.⁶³

c. Visi dan Misi Forum Bangun Aceh (FBA)

Visi yang ingin dicapai oleh FBA adalah membantu orang lain untuk hidup lebih baik. Untuk mencapai visi tersebut FBA membangun misi mewujudkan masyarakat aceh yang lebih

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

⁶¹ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

⁶² Program Disabilitas, Diakses Tanggal 03 Februari 2021 pada Link <https://www.fba.or.id/disability.html>

⁶³ Profil Program Pemberdayaan Ekonomi, Diakses Tanggal 03 Februari 2021 pada Link <https://www.fba.or.id/economic-empowerment.html>

tangguh, sejahtera, cerdas, inklusif dengan bersumberdaya yang mereka miliki.⁶⁴

d. Program Forum Bangun Aceh

Forum Bangun Aceh (FBA) dalam melaksanakan program kerja memiliki program untuk disabilitas. Program ini dimulai pada akhir tahun 2016, programnya sendiri adalah ACBID (*Aceh Community Based Inclusive Development*) yaitu pembangunan inklusi berbasis bersumberdaya masyarakat Aceh. Bersumberdaya berarti dari masyarakat untuk masyarakat. Program ini sendiri melakukan pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk disabilitas, semua jenis disabilitas. Dalam menjalankan program mereka juga melakukan sistem 2 arah.

Pada bulan Januari 2017 mereka turun lapangan, kemudian melakukan sosialisasi ke Kabupaten Aceh Besar. Pada tahun 2017 Forum Bangun Aceh (FBA) masuk ke 3 Kecamatan yaitu Montasik, Ingin Jaya, dan Krueng Barona Jaya. Pada tahun 2018 di tambah 3 Kecamatan, yaitu Blang Bintang, Darul Kamal dan Suka Makmur. Pada saat itu mereka melakukan sosialisasi kepada seluruh desa, dan memberitahu program mereka beserta tujuannya, cara kerja dan meminta dukungan kepada semua lapisan masyarakat. Hampir semua kepala desa berkomitmen untuk mendukung program Forum Bangun Aceh (FBA) sampai saat ini.

Berdasarkan program yang mereka rancang untuk disabilitas, Forum Bangun Aceh (FBA) bekerja di 6 wilayah Kecamatan Aceh Besar dari 23 Kecamatan. Forum Bangun Aceh (FBA) bermitra dengan dinas sosial dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kemudian mereka juga menjalin MOU. Berikut daftar tabel wilayah kerja beserta jumlah disabilitas, diantaranya sebagai berikut:

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin, Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 14.20

Tabel 4.1 Data Kecamatan Wilayah Kerja dan Jumlah Disabilitas.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Disabilitas
1.	Montasik	176 orang
2.	Ingin Jaya	267 orang
3.	Krueng Barona Jaya	176 orang
4.	Blang Bintang	140 orang
5.	Darul Kamal	96 orang
6.	Suka Makmur	127 orang
	Jumlah	982 orang

Sumber: Dokumentasi Forum Bangun Aceh (FBA)

Berdasarkan tabel di atas dari hasil dokumentasi dan arsip, diketahui bahwa jumlah orang dengan disabilitas perenam kecamatan adalah 982 orang. Pada 6 wilayah kecamatan inilah yang mereka lakukan advokasi dan pendampingan terhadap orang dengan disabilitas.

Pada program ACBID ini Forum Bangun Aceh (FBA) fokus pada 2 segmen, yaitu pemberdayaan sosial dan ekonomi. Kedua segmen tersebut yang di dampingi oleh Forum Bangun Aceh (FBA) adalah ODD (orang dengan disabilitas). Forum Bangun Aceh (FBA) sendiri mempunyai banyak pengalaman di bagian pemberdayaan (*livelihood*), mulai dari korban tsunami, perempuan, korban konflik, orang miskin sampai sekarang fokus dengan disabilitas. Terdapat beberapa kriteria yang mendapatkan pendampingan oleh forum bangun aceh (FBA), antara lain:

- a.) Usia produktif (18-55 tahun)
- b.) Rentan ekonomi, yaitu disabilitas yang miskin
- c.) Disabilitas sedang/disabilitas langsung, yaitu mereka yang dapat melakukan sebagian besar kegiatan sehari-hari.
- d.) Disabilitas berat/anak-anak, yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat

direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari secara mandiri, dan sepanjang hidupnya mereka tergantung pada bantuan orang lain serta tidak mampu menghidupi diri sendiri. Maka, kategori ini yang akan diberikan pendampingan ialah kepada keluarganya

Permasalahan besar yang dihadapi disabilitas adalah pada segi kehidupan sosial. Hasil survey Forum Bangun Aceh (FBA) menunjukkan bahwa 70% lebih orang disabilitas dapat dikatakan bermasalah dengan sosialnya, mereka tidak pernah keluar rumah, tidak terlibat dalam masyarakat, jarang menghadiri acara rapat, kenduri, dan sebagainya terutama disabilitas berat dan anak-anak. Orang tua yang mempunyai anak disabilitas, cenderung mereka tidak pernah membawanya pada tempat keramaian. Melihat disabilitas mempunyai masalah tersebut, Forum Bangun Aceh (FBA) memutuskan untuk fokus pada pemberdayaan sosial dan ekonomi.⁶⁵

Forum Bangun Aceh (FBA) membangun sistem sosial untuk membentuk modal sosial bagi disabilitas dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu bentuk yang dilakukan adalah memasukkan orang disabilitas ke dalam kelompok wirid, PKK, dan kelompok sosial lainnya. Advokasi terlebih dahulu dilakukan kepada kelompok masyarakat sebelum melaksanakan program kegiatan, agar mereka menerima orang dengan disabilitas ke dalam kelompok tersebut. Setelah mereka bergabung dalam kegiatan kelompok sosial, memiliki modal sosial, dan mempunyai rasa percaya diri yang kuat, barulah melakukan *livelihood* kepada mereka. Fokus komponen pada program ini ada beberapa, diantaranya;

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nurul Asyura, Bidang Project Koordinator ACBID Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.00

1. Advokasi : terdapat beberapa sasaran dalam melakukan advokasi, antara lain;
 - a) Stakeholder (Pemangku Kepentingan), mulai dari tingkat Kabupaten (Bupati), Kecamatan (Camat, pekerja sosial), dan Desa (Keuchik, Sekretaris Desa).
 - b) Pemberi Kerja, agar orang yang memiliki usaha dapat menerima orang dengan disabilitas untuk bekerja baik di lembaga formal maupun informal.
 - c) Kemudian melakukan advokasi kepada kelompok masyarakat dan keluarga.
2. ODD (Orang Dengan Disabilitas), terbagi menjadi 2 yaitu sosial dan livelihood.
3. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), kelompok ini adalah kelompok yang dibentuk oleh Forum Bangun Aceh (FBA). Motif dari kelompok swadaya masyarakat ini adalah ekonomi, mereka mengumpulkan uang mereka dan uang tersebut untuk mereka. Apabila di desa tersebut terdapat golongan disabilitas yang mempunyai usaha, tetapi memiliki kendala dengan modal maka mereka dapat mengakses di Kelompok Swadaya Masyarakat ini. Kelompok ini memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti koperasi, sifatnya inklusi. Pada saat pembentukan kelompok ini, orang dengan disabilitas diharuskan hadir dan bergabung karena mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkannya.⁶⁶ Perlakuan yang diberikan oleh Forum Bangun Aceh (FBA) untuk Kelompok Swadaya Masyarakat ini adalah:
 - a) Memfasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat
 - b) Memfasilitasi meningkatnya tingkat inklusifitas

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Nurul Asyura, Bidang Project Koordinator ACBID Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.00

- c) Meningkatkan kapasitas pengurus
- d) Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan rutin
- e) Memonitor dan mendampingi perkembangan sistem administrasi keuangan, kelembagaan, dan usaha kelompok
- f) Menghubungkan dengan jejaring
- g) Memastikan keberlanjutan dengan memupuk rasa kepemilikan anggota terhadap kelompok mereka⁶⁷

Kelompok swadaya masyarakat ini memiliki misi sosial dan ekonomi agar orang lain dapat melihat bahwa orang dengan disabilitas mampu mengadvokasikan dirinya sendiri, mereka juga mempunyai usaha. Secara tidak sengaja terbentuknya kelompok swadaya masyarakat ini membuat masyarakat sadar terhadap disabilitas.

4. Bermitra dengan DPO (organisasi orang dengan disabilitas)

Terdapat beberapa hal lainnya yang dilakukan Forum Bangun Aceh (FBA) untuk mendukung pemberdayaan dan sosialnya disabilitas, karena mengingat orang dengan disabilitas tinggal dan berada di lingkungan masyarakat maka sebagai lembaga tidak dapat fokus dengan disabilitas saja. Melakukan advokasi dengan pemangku kepentingan di semua Dinas Aceh Besar merupakan hal penting untuk memberikan pemahaman terkait isu disabilitas. Kemudian mengejar adanya kebijakan yang berpihak kepada disabilitas. Satu kebijakan yang berhasil Forum Bangun Aceh (FBA) advokasi ialah dana desa yang inklusi.

Pekerja sosial diberikan pemahaman dengan membentuk pelatihan tentang *Disability Inklusi Development* (Pembangunan Inklusi Disabilitas). Orang-orang yang menjadi sasaran untuk

⁶⁷ Program Disabilitas, Diakses Tanggal 03 Februari 2021 pada Link <https://www.fba.or.id/ksm.html>

melakukan advokasi diberikan pelatihan. Disabilitas bukanlah isu baru yang ada di Aceh, namun masih banyak orang yang tidak mengetahuinya. Orang yang bekerja untuk disabilitas tidak banyak, disertai dengan disabilitas pun banyak yang tidak muncul dalam lingkungan masyarakat, sehingga orang-orang jarang mendengar perihal isu disabilitas. Maka, Forum Bangun Aceh (FBA) merancang segala kebijakan agar mencakup seluruh lapisan/kalangan masyarakat, termasuk disabilitas. Sehingga mereka dapat merasakan hak yang sama, hak yang dimaksud ialah hak sosial dan hak ekonomi.

Indikator dari *Project* ini yang Forum Bangun Aceh (FBA) nilai adalah orang dengan disabilitas dihargai di masyarakat. Hal ini yang menjadi dasar bahwa kelompok masyarakat sangat penting, karena saat orang dengan disabilitas masuk dalam kelompok tersebut mereka merasakan bahwa kehadirannya dihargai dan setara dengan anggota masyarakat lainnya.

Tekait dengan pemberdayaan, yang pertama dilakukan oleh Forum Bangun Aceh (FBA) antara lain:

1. Assessment terhadap kebutuhan dan identifikasi permasalahan dikalangan disabilitas

Assessment dilakukan kepada orang dengan disabilitas secara langsung, kemudian keluarga dan kepala desa/masyarakat. Pada saat melakukan assessment, Forum Bangun Aceh mempunyai bentuk teknis sendiri. Staf lapangan sebelum melakukan assessment dibekali training, baik cara melakukan *interview*, observasi atau *crosscheck* (memeriksa kembali) data dengan pihak-pihak yang lain. Assessment ini dilakukan berkali-kali, karena tidak ingin memiliki kesan seperti memberi bantuan.

Pada saat melakukan assessment Forum Bangun Aceh (FBA) tidak pernah menawarkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka menanyakan apa yang diinginkan olehnya serta dalam hal usaha bersifat jangka panjang seperti apa yang diinginkan,

kemudian usaha tersebut ingin dipasarkan kemana. Staf lapangan dibekali dengan manajemen usaha, pasar, analisa dan semua yang berhubungan dengan usaha agar memberikan gambaran kepada benefit pendampingan. Sehingga mereka dapat membuka usaha dan menjalankan usaha yang mereka inginkan sesuai dengan sasaran yang dipasarkan.

2. *Livelihood*, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Livelihood ini bentuknya berupa pelatihan/magang. Pelatihan yang dilakukan tergantung permintaan. Forum Bangun Aceh (FBA) memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang dengan disabilitas, seperti *skill*. *Skill* ini yang berbentuk dilatih, seperti menjahit, membordir, memasak, membuat kue dan mereka juga bekerja sama dengan balai pelatihan kerja (BLK).

Berdasarkan pengamatan, masih banyaknya disabilitas yang tidak memiliki transportasi, mempunyai tanggungan, sehingga pihak Forum Bangun Aceh (FBA) harus menyesuaikan beberapa pelatihan yang akan diberikan kepada orang dengan disabilitas. Dimulai dari pelatihan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan, dan memanggil pelatihnya. Pelatihan yang akan dilakukan memang harus disesuaikan, karena orang dengan disabilitas memiliki mobilisasi yang terbatas.

Forum Bangun Aceh (FBA) menempatkan orang dengan disabilitas ditempat tertentu untuk melakukan magang. Apabila mendapatkan disabilitas yang ingin magang di bengkel, maka mereka mengajak orang dengan disabilitas untuk belajar langsung di bengkel tersebut. Mereka magang mulai dari 0 yang awalnya tidak mengetahui perihal bengkel sampai sudah bekerja. Magang dan pelatihan ini dilakukan selama 3 bulan.

3. Membuka Lapangan Pekerjaan

Setelah orang dengan disabilitas selesai mengikuti pelatihan dan magang, Forum Bangun Aceh (FBA) mendatangi mereka dan menanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Apabila orang dengan disabilitas diterima untuk tetap bekerja ditempatnya, maka mereka akan di kontrak langsung menjadi karyawan. Jika mereka tidak diterima untuk bekerja, maka pihak Forum Bangun Aceh (FBA) akan mencari pemberi kerja lain yang sudah dilakukan advokasi.

Staf program ini memastikan bahwa disabilitas diperlakukan sama dengan yang lainnya, mendapatkan haknya dan memastikan tidak adanya diskriminasi dari pemberi kerja maupun dari staf lainnya. Inilah yang dilakukan oleh Forum Bangun Aceh (FBA) pada saat monitoring untuk didampingi secara *livelihood*.

4. *Monitoring* terhadap disabilitas

Monitoring merupakan pemantauan terhadap objek dalam mengevaluasi kondisi atau kemajuan. Berdasarkan kerja keras bersama, terdapat sekitar 151 orang di Aceh Besar yang Forum Bangun Aceh (FBA) dampingi *livelihoodnya* sudah bekerja, diantaranya; bekerja di bengkel, membuka usaha, bekerja di lembaga formal maupun nonformal, bekerja di butik, mengambil orderan dari butik. Orang dengan disabilitas yang mereka dampingi ini terus melakukan mentoring selama 3 bulan sekali.

Monitoring ini mendatangi langsung orang dengan disabilitasnya, kemudian melakukan training sampai mereka berani berbicara dan membuka dirinya untuk orang lain masuk ke dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat dan orang dengan disabilitas harus bekerja sama agar mendapatkan ruang yang sama di dalam masyarakat. Disini masyarakat sebagai media, sedangkan disabilitasnya harus terbuka agar dapat masuk ke dalam kelompok masyarakat tersebut. Tujuannya ialah agar mereka memiliki

kemauan untuk bekerja. Jadi, secara sosial dan perlengkapan lainnya Forum Bangun Aceh (FBA) dampingi.

Berdasarkan hasil advokasi yang telah dilakukan oleh Forum Bangun Aceh (FBA), seorang dengan disabilitas sudah bekerja menjadi guru PAUD di daerah Ingin Jaya. Advokasi tersebut tidak hanya dilakukan kepada sekolahnya, melainkan disabilitasnya juga. Maka, secara sosial mereka sudah kuat dan mempunyai pendapatan untuk menghidupi keluarganya. Forum Bangun Aceh (FBA) bekerja terkait dengan program untuk disabilitas dimulai dari 0 sampai orang dengan disabilitas mampu berdiri sendiri.

Pada awal tahun 2019 Forum Bangun Aceh (FBA) mempunyai target untuk membuat desa inklusi. Pada saat dalam perjalanannya Forum Bangun Aceh (FBA) melihat ada peluang ketika dana desa menjadi otoriter desa. Mereka melihat apakah orang dengan disabilitas sudah mendapatkan haknya. Ada beberapa pemberdayaan di desa seperti, pelatihan menjahit. Mereka melihat apakah disabilitas terlibat dalam pelatihan tersebut, karena dana tersebut terbuka untuk seluruh masyarakat dan ternyata disabilitas belum terlibat di dalamnya. Disabilitas belum terlibat dalam pelatihan tersebut bukan karena kepala desa tidak ingin melibatkannya, hanya saja mereka tidak mengetahui bahwasanya disabilitas dapat mengikuti kegiatan pelatihan tersebut.

Terdapat sekitar 30 desa yang sudah berkomitmen menjadi desa inklusi, salah satu indikator desa inklusi ialah memiliki data disabilitas. Forum Bangun Aceh (FBA) menginginkan data tersebut berbasis desa, sehingga jika desa mempunyai data tersebut akan mudah untuk mencari desa inklusi. Disamping itu pada desa tersebut melibatkan disabilitas dalam perencanaan, misalnya Musrembang, disabilitas aktif di dalam desa. Dana penganggaran desa untuk disabilitas digunakan membangun layanan aksesibel, memberikan alat bantu, dan pemberdayaan.

Pada Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar terdapat satu desa yang sudah realisasi membangun rumah untuk disabilitas dari dana desa, yaitu Desa Pante Rawa. Apabila desa sudah membangun artinya masyarakat sudah mulai memahami apa yang dibutuhkan orang dengan disabilitas. Tujuan program ini adalah sebagai bentuk peningkatan hidup orang disabilitas.⁶⁸

e. Hambatan Forum Bangun Aceh (FBA) dalam Melaksanakan Program

Setiap lembaga tentunya memiliki kendala/hambatan dalam menyelenggarakan program dengan tujuan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Disabilitas yang menjadi fokus sasaran pemberdayaan berasal dari beberapa titik wilayah yang berbeda, baik desa, dan kecamatan hanya saja berada di kabupaten yang sama yaitu Aceh Besar. Banyak faktor hambatan yang bertentangan dalam melakukan kegiatan mengadvokasi isu disabilitas.⁶⁹

Berikut ini beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Forum Bangun Aceh (FBA), antara lain:

- a) Melakukan audiensi ulang kepada pihak stakeholder yang pada saat itu terdapat beberapa pemangku kepentingan disebuah instansi yang telah berganti orang.
- b) Banyaknya pemberi kerja yang tidak menerima disabilitas karena mereka memiliki kesulitan pada saat berkomunikasi dengan disabilitas.
- c) Banyaknya desa yang sulit menerima kehadiran Forum Bangun Aceh (FBA) untuk membentuk kelompok swadaya masyarakat.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Nurul Asyura, Bidang Project Koordinator ACBID Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.00

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Nurul Asyura, Bidang Project Koordinator ACBID Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.30

Tantangan yang dihadapi dengan disabilitasnya sendiri, antara lain:

- a) Masih banyaknya disabilitas yang tidak mempunyai motivasi.
- b) Banyaknya disabilitas yang tidak mempunyai cita-cita.
- c) Banyaknya disabilitas yang tidak mempunyai tujuan.
- d) Masih banyaknya disabilitas yang tidak berpendidikan.
- e) Orang disabilitas tidak memiliki keteguhan prinsip, dengan kata lain masih banyak yang tidak konsisten (plin plan).
- f) Mudah dihasuti oleh orang lain.
- g) Masih adanya disabilitas ketika sudah bekerja dan mendapatkan uang mereka bermalas-malasan tidak mau bekerja lagi.
- h) Masih memiliki *mindset charity*.
- i) Disabilitas masih mendapatkan kesulitan akses, seperti dalam layanan kesehatan, pendidikan.

Beberapa tantangan yang terdapat dalam keluarga orang dengan disabilitas, antara lain:

- a) Masih adanya keluarga yang tidak mensupport anaknya yang memiliki kedisabilitasannya.
- b) Mengusir orang Forum Bangun Aceh (FBA) yang bekerja di lapangan.⁷⁰

B. Masalah Sosial Disabilitas di Aceh Besar

Sebagai masyarakat yang dipandang kelas dua, kelompok disabilitas memiliki permasalahan-permasalahan yang spesifik, dapat dibagi kedalam permasalahan secara individu (pribadi),

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Nurul Asyura, Bidang Project Koordinator ACBID Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021, Pukul 11.00

keluarga dan sosial. Berikut akan dijelaskan permasalahan-permasalahan tersebut:

1. Permasalahan Individu (Pribadi) Disabilitas

a. Disabilitas adalah Cacat dan Rasa percaya diri rendah

Secara individu, disabilitas merasa bahwa mereka adalah cacat. Hal ini disebabkan pola pikir yang cenderung mempengaruhi mental. Permasalahan yang muncul itu membuat disabilitas memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga menghambat proses pengubahan paradigma terhadap disabilitas.

Disabilitas yang memiliki rasa percaya diri yang rendah membuat mereka tidak ingin bertemu dengan orang lain karena merasa malu, berbeda dengan orang kebanyakan, takut orang merendahkan mereka, dan sebagainya. Hal ini membuat disabilitas terus berada dalam kurungannya.

b. Ketergantungan dengan Keluarga

Keluarga yang memiliki seorang anak disabilitas cenderung tidak membolehkannya keluar dari rumah, sehingga membuat disabilitas ini ketergantungan dengan keluarga. Disamping keluarga yang tidak mendukung kemudian disabilitas tidak ingin keluar dari lingkungan keluarga membuat mereka akan terus-menerus ketergantungan. Faktor lainnya ialah mereka belum siap untuk merasakan langsung perlakuan dari orang lain terhadap dirinya, orang tua belum percaya bahwa anaknya mampu, orang tua lebih fokus pada kekurangan dan cara penanganan anak dibandingkan menggali kompetensi yang dimiliki anak, disabilitas memiliki rasa khawatir dalam menghadapi lingkungan sehingga kelompok disabilitas tidak dapat bertumbuh kembang dan melakukan aktivitas secara mandiri.

Keluarga atau orang tua seharusnya belajar untuk menerima anak dengan kekurangan dan kelebihannya, belajar terkait hambatan yang dialami anak serta mencari informasi potensi yang

dimilikinya, meluangkan waktunya, menghadiri sosialisasi tentang disabilitas, mendorong anak dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini tidak terlepas dari dukungan keluarga yang dapat menunjang kemandirian disabilitas itu sendiri.

c. Kapasitas Rendah Kurang Pendidikan

Setiap orang mengalami berbagai keterbatasan, salah satunya ialah disabilitas. Disabilitas memiliki keterbatasan dalam fungsi berfikir/fungsi adaptif karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dalam jangka waktu yang lama. Disabilitas intelektual menyangkut kemampuan dan kecerdasan mereka. Kecerdasan mereka di bawah rata-rata, namun mereka tetap memiliki potensi dan bahkan pada bidang tertentu memiliki kelebihan. Terdapat 3 tingkat Intelegensi/IQ, yaitu ringan, sedang dan berat.⁷¹ Ada juga disabilitas yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, mereka memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas yang dimilikinya.⁷² Sehingga mereka mampu melakukan segala aktivitas dan kebutuhannya secara mandiri.

Ditambah disabilitas mendapat dukungan yang baik dari keluarga dengan mendapatkan pendidikan yang memadai, di bimbing, belajar sosialisasi, adanya pengarahan, dan memberikan peluang untuk dapat bermain dengan teman sebayanya agar mendapat kesempatan yang lebih luas bagi mereka. Jika mereka mendapatkan dukungan dari keduanya, yaitu keluarga dan lingkungan maka tingkat IQ dapat berkembang lebih baik sesuai kecerdasan dan kemampuan yang dimilikinya, karena itu semua

⁷¹ Media Disabilitas, “Penyandang Disabilitas Intelektual”, Diakses Tanggal 11 Maret 2021 pada <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual>

⁷² Media Disabilitas, “Penyandang Disabilitas Intelektual”, Diakses Tanggal 11 Maret 2021 pada <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual>

sangat berpengaruh dalam membentuk konsep diri mereka.⁷³ Namun, jika mereka tidak mendapatkan hal tersebut dapat menghambat perkembangan disabilitas.

d. Miskin

Berdasarkan yang telah diketahui sebelumnya, disabilitas menjadi miskin karena kurangnya mendapatkan pendidikan sehingga tidak dapat mengakses pekerjaan yang layak. Akibatnya berdampak pada tidak memiliki pendapatan untuk menunjang kelangsungan hidup. Kemudian disabilitas yang lahir dari keluarga miskin, maka mereka juga rentan akan menjadi miskin. Disamping itu ada faktor lain yang dapat menyebabkan disabilitas menjadi golongan miskin, yaitu malas bekerja, tidak mendapatkan informasi yang memadai, tidak mendapatkan pemberdayaan, mereka sulit mengakses layanan kesehatan karena biaya mahal, maka mereka akan masuk pada lingkaran setan.

2. Disabilitas dan Hubungan dengan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat pertama yang dapat mendukung segala sesuatu, terutama dukungan sosial. Keluarga dan disabilitas ini memiliki ikatan emosional sehingga sangat berpengaruh dalam menimbulkan kembali gairah hidup mereka. Keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam memberikan dukungan sosial untuk membentuk perkembangan anak, dimana mereka merasa di terima dan di bantu saat berada dalam lingkungannya.

Dukungan ini dapat memberikan manfaat, baik dari yang menerima dukungannya maupun orang lain. Namun dalam hal ini masih terdapat persepsi seseorang yang tidak menerima sumber-sumber dukungan sosial terhadap disabilitas. Seperti yang

⁷³ Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kemampuan Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus, Diakses Tanggal 11 Maret 2021 pada <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas>

disampaikan oleh Bapak Syaifullah Puteh selaku Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar di Forum Bangun Aceh (FBA) menyatakan bahwa:

“Orang dengan disabilitas sering sekali menjadi korban dari kerentanannya, terdapat stigma yang terjadi di dalam masyarakat bahwa disabilitas itu dianggap sebagai aib keluarga, kutukan, dosa keluarga, dan dosa orang tua. Orang memandang disabilitas sebagai makhluk yang aneh. Maka terdapat pelebelan yang dialami oleh orang dengan disabilitas.”⁷⁴

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa stigma/pelabelan terhadap disabilitas sangat tinggi. Dimana masih banyak yang menganggap kehadiran orang dengan disabilitas karena kesalahan orang tuanya pada masa lalu, sebuah kutukan dari Allah. Disabilitas juga dianggap sebuah aib keluarga sehingga masih banyak orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas membatasi ruang gerak mereka untuk melakukan fungsi sosialnya kepada orang lain. Pada akhirnya orang dengan disabilitas ini jarang terlihat di lingkungan masyarakat, jarang menghadiri acara, jarang terlibat dalam kegiatan gampong.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Zulvia Maika Letis selaku Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebral Palsy (Yayasan Sahabat Difabel Aceh) menyatakan bahwa:

“Orang tua yang memiliki anak dengan kondisi seperti ini mengalami kemiskinan/malu, apalagi dengan anggapan orang-orang jaman bahwasannya anak difabel ini adalah dianggap anak yang tidak berkah, tidak membawa rezeki sehingga dikucilkan di dalam keluarga. Sehingga orang tua

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

mereka kebanyakan malu, ketika rasa malu itu muncul tidak ada lagi kepercayaan diri untuk menampilkan si anak”.⁷⁵

Keluarga semestinya memperlakukan anak dengan baik, karena mereka pembawa pintu rezeki. Disabilitas ini memiliki insting atau perasa yang sangat tajam sehingga mereka dapat merasakan langsung bagaimana perilaku kita terhadap dirinya. Tanpa disadari bahwa disabilitas ini mempunyai potensi yang luar biasa hanya saja pemerintah yang memiliki kewenangan dan masyarakat menerima kehadirannya dapat memberikan wadah bagi mereka untuk mengeksplere kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhannya. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak dapat menilai orang dengan mengukur berdasarkan kesempurnaan yang dimiliki, karena Allah menciptakan makhluk-Nya dengan sempurna.

Kemudian Ibu Zulvia Maika Letis juga mengatakan bahwa:

“Banyak orang tua yang tidak mau menganggap mereka sebagai anaknya. Keluarganya tidak mau membawanya kemana-mana. Ada juga anak dengan disabilitas yang mengalami ketidakadilan di dalam keluarganya, mereka dipisahkan tempat untuk si anak ini tinggal dengan tempat orang tuanya tinggal. Mereka dibuatkan tempat tinggal sendiri atau gubuk kecil dan tidak tinggal dalam satu rumah dengan keluarganya, seperti di kandang ayamkan”.⁷⁶

Keluarga yang malu memiliki anak dengan disabilitas karena adanya faktor eksternal yang membuat stigma muncul. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap keluarga yang dianggap sebagai aib dalam masyarakat, sehingga lingkungan memaksa kita untuk melakukan dengan menampilkan seolah-olah keadaan di

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Zulvia Meika Letis (Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebral Palsy Yayasan Sahabat Difabel Aceh), Pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Zulvia Meika Letis (Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebral Palsy Yayasan Sahabat Difabel Aceh), Pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

dalam keluarga baik-baik saja. Akhirnya membuat keluarga yang memiliki anak disabilitas merasa minder dan tidak adanya kepercayaan diri untuk menampilkan anak dengan kedisabilitasnya. Perbedaan fisik adalah kelebihan yang dimiliki dari diri disabilitas sendiri. Kelebihan itulah yang membuat mereka mempunyai keunikan dari pada orang lain. Maka, hargailah mereka sebagai pribadi yang dimilikinya tidak karena fisiknya.

Pelabelan negatif terhadap disabilitas meluas ke dalam masyarakat, salah satu dampaknya adalah terjadinya marginalisasi sosial dan budaya. Tidak hanya itu, dalam mainstream pembangunan bahkan mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan. Marginalisasi juga terlihat pada saat pengambilan keputusan dalam masyarakat mulai dari level yang terendah sampai tertinggi. Disabilitas termarginalkan dari sosial, budaya, struktur sosial, pemerintahan dan pembangunan. Meskipun secara hukum hak disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, namun kenyataannya bukan perkara mudah bagi mereka untuk mengakses hak-hak tersebut.⁷⁷

Kondisi tersebut membuat orang dengan disabilitas terpisahkan dari masyarakat dan menjadikan mereka ke dalam golongan yang terpinggirkan. Cara pandang seperti ini yang seharusnya dirubah sebagai bentuk upaya membangun perubahan yang dilakukan dari berbagai pihak untuk lebih sadar terhadap disabilitas. Stigma yang timbul di dalam masyarakat terhadap disabilitas dapat menghambat adanya kebijakan HAM bagi orang dengan disabilitas.

Menurut pandangan Goffman, penyandang disabilitas mengalami stigma karena ketidaksempurnaannya. Goffman mengungkapkan bahwa masalah sosial utama disabilitas yang dihadapi adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang

⁷⁷ Musdawati, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, (Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020), hlm. 135-136.

sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberi stigma kepada penyandang disabilitas bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam melakukan segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah.⁷⁸

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas merupakan sebuah langkah dalam upaya menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminatif yang dialami oleh penyandang disabilitas. Undang-Undang ini melihat penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan dan modal sosial yang dapat berkontribusi bagi pembangunan.⁷⁹ Undang-Undang yang sudah dirancang dan disahkan diharapkan dapat di implementasikan dengan baik, dengan hadirnya Undang-Undang ini seharusnya dapat membawakan perubahan terhadap disabilitas itu sendiri.

Namun pada kenyataannya yang ditemukan pada saat dilapangan, masih adanya keluarga yang tidak memberikan kebutuhannya dengan baik karena kurangnya pemahaman terkait masalah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mikraj selaku *Community Organizer* Forum Bangun Aceh (FBA) beliau mengatakan bahwa:

“Masalah sosial disabilitas sebelum FBA datang ke lapangan, disabilitas memiliki kepercayaan diri yang sangat minim, keluarga yang memiliki anak disabilitas terkadang menyembunyikan anaknya dari masyarakat, merasa malu seolah-olah anak disabilitas itu dikatakan sebagai kutukan makanya disembunyikan. Kemudian tidak disekolahkan, ada yang disekolah hingga SD, wawasan keluarga yang

⁷⁸ Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 205.

⁷⁹ Felani Budi Hartono dan Isneningtyas Yulianti, *Buku HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2018), hlm. 6.

memiliki anak disabilitas kurang paham bagaimana mengelola kemampuan anaknya, pemerintah tidak memiliki data riil tentang disabilitas, stakolder juga dalam memberikan kebijakan ragu-ragu jika tidak mempunyai aturan permanen tentang disabilitas. Aksesibilitas fisik tidak mendukung untuk disabilitas beraktivitas.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa minimnya kepercayaan diri disabilitas sehingga mereka tidak mempunyai keberanian untuk mengeluarkan pendapat bahkan menyuarkan isu disabilitas. Dampaknya, stakolder tidak mengoptimalkan kebijakan yang dibuat untuk disabilitas dan kurangnya pengetahuan terkait isu disabilitas karena pelaku disabilitas tidak bergerak melakukan advokasi. Disabilitas mengalami masalah sosial kemudian pendidikan dan akan berpengaruh juga terhadap faktor ekonomi sehingga kemiskinan akan muncul. Pemberdayaan sosial dan ekonomi kepada disabilitas penting dilakukan agar mereka dapat meningkatkan perekonomiannya dan menghidupi keluarganya dengan baik.

Keluarga yang kurang mendapatkan informasi terkait disabilitas tidak paham cara memberikan pola asuhnya untuk menghadapi segala bentuk yang dibutuhkan, sehingga mereka tidak menyekolhkannya bahkan mereka sekolah hanya sampai setengah jalan. Apabila keluarga menyadari pentingnya memberikan kebutuhan disabilitas, maka secara maksimal diupayakan agar mereka mendapatkan pendidikan yang tinggi dan meningkatkan ketahanan untuk terus peduli.

Rendahnya kualitas pendidikan dikalangan disabilitaas berdampak pada kemandirian, baik kemandirian secara personal maupun kemandirian dalam mengupayakan hidup yang layak bagi diri mereka sendiri. Mayoritas disabilitas harus menggantungkan hidup mereka seumur hidup kepada orang di sekitarnya. Mereka

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Mikraj, Bidang Community Organizer FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

mengalami kerentanan dan pengabaian hidup sangat tinggi, apa lagi disabilitas di kalangan keluarga miskin.⁸¹

Kemiskinan pada dasarnya jauh lebih kompleks. Menurut *Robert Chambers*, unsur-unsur yang terkandung dalam perangkap kemiskinan adalah kerentanan, kelemahan jasmani, ketidakberdayaan dan isolasi. Ketidakberdayaan golongan masyarakat miskin menyebabkan mereka tetap rentan dan sulit untuk berkembang.⁸² Disabilitas termasuk golongan yang rentan mengalami kemiskinan apabila kebutuhan dan haknya tidak mereka dapatkan secara penuh.

3. Sosial

Stigma yang dialami penyandang disabilitas membuat mereka termarginalkan dari penerimaan sosial yang utuh dan mengarah pada pembentukan identitas sosial yang rusak. *Weatbrook* (1993) pernah melakukan studi bahwa sikap sosial yang negatif seringkali berbentuk hambatan dalam menjalankan peran sosial dan aktivitas serta akses-akses ke pelayanan masyarakat.⁸³ Kemudian Bapak Syaifullah Puteh menyatakan bahwa:

“Disabilitas di Aceh Besar sebagian besar masih terkurung berada di dalam rumah, artinya mereka tidak melakukan aktivitas sosial, ada juga disabilitas yang hidupnya bergantung dengan keluarga karena memang tidak melakukan aktivitas sosial. Mereka tidak melakukan aktivitas sosial karena memang masih adanya stigma negatif di dalam masyarakat bahwa disabilitas adalah orang yang tidak memiliki kemampuan dan juga akses terhadap mereka tidak ada makanya mereka tidak melakukan

⁸¹ Musdawati, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, hlm. 136.

⁸² Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67-68.

⁸³ Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, hlm. 205.

aktivitas sosial. Seperti meunasah, disabilitas pengguna kursi roda tidak bisa mengakses karena mereka tidak dapat mencapai ke tempat wudhu di tempat tersebut memiliki tangga yang tinggi untuk mencapai dasar dari pada meunasah tersebut, kondisi itulah disabilitas tidak dapat melakukan aktivitas sosial.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa disabilitas di Aceh Besar masih banyak yang tidak keluar dalam lingkungan sosial untuk melakukan aktivitas dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Stigma yang muncul dalam lingkungan bahwa disabilitas tidak memiliki kemampuan terus terjadi. Tanpa disadari bahwa ada disabilitas yang memiliki potensi lebih dari orang tidak dengan disabilitas namun hal itu tidak terlihat karena ketidakadanya upaya untuk mendekati diri dengan mereka dan selalu memandang mereka dengan sebelah mata atas ketidaksempurnaanya.

Meremehkan kemampuan penyandang disabilitas merupakan hambatan utama untuk inklusi dan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi mereka. Sikap meremehkan di dalam masyarakat mulai dari para profesional, politisi dan pembuat keputusan lainnya terhadap keluarga dan teman-teman serta para penyandang disabilitas itu sendiri karena tidak adanya bukti bahwa mereka itu berharga dan didukung seringkali meremehkan kemampuan mereka sendiri.⁸⁵ Lebih jelasnya hal ini juga disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Syaifullah Puteh bahwa:

“Hambatan-hambatan sosial yang dihadapi disabilitas terutama di Aceh Besar. Pada disabilitas tuna wicara pada saat menghadiri rapat mereka tidak mengetahui apa yang

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB

⁸⁵ Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, hlm. 206.

dibicarakan karena tidak ada yang menjelaskan kepadanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Tuna rungu tidak dapat mengikuti rapat di gampong karena memang memiliki kondisi seperti itu. Pada sektor pemerintahan tidak ada membuka ruang untuk disabilitas terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, tidak ada perlibatan disabilitas dalam musyawarah-musyawarah gampong. Kemudian data disabilitas tidak masuk ke dalam data terpadu, tidak ada proses pendataan yang komprehensif tentang disabilitas.”⁸⁶

Masih kurangnya ketersediaan yang mendukung kebutuhan disabilitas di dalam gampong membuat mereka semakin memiliki hambatan. Perlunya melakukan peningkatan pengembangan dalam pembangunan gampong yang inklusi agar semua akses termasuk aktivitas sosial menjadi inklusi. Berdasarkan tinjauan tersebut sehingga hambatan yang selama ini disabilitas alami akan menjadi sebuah anugerah karena gampong sudah mulai menilik kebutuhan yang memihak kepada kepentingan disabilitas dan mereka dalam melakukan aktivitasnya dengan baik.

Penyesuaian sosial menjadi suatu persyaratan untuk terpenuhinya kehidupan sosial. Hal ini merupakan suatu proses yang dialami setiap individu termasuk disabilitas ketika berhadapan dengan lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Kemampuan ini dapat dikembangkan untuk hidup bermasyarakat dengan menghargai orang lain, membangun relasi yang sehat dengan orang lain, berperan aktif dalam kegiatan sosial, serta menghormati nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di lingkungannya. Sehingga membuat hubungan individu dengan individu lainnya dan lingkungan sosialnya menjadi harmonis dan diterima oleh masyarakat.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 09.30 WIB

⁸⁷ Serista Silnya Joste, “Penyesuaian sosial (social Adjustment) Pada Mahasiswa Disabilitas” (Skripsi Program Studi Psikologi, Universitas Sanata Dharma, 2019), hlm. 11.

Tantangan sosial yang dihadapi oleh disabilitas adalah penyesuaian diri dengan kelompok sosial. Dimana posisi mereka sebagai seorang disabilitas kerap sekali mengalami penolakan dari berbagai pihak mengenai keberadaan penyandang disabilitas. Apabila kelompok disabilitas dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada di lingkungan sosial serta mampu menyelesaikan konflik mental yang berasal dari dalam dirinya maupun lingkungan sosial, begitupun sebaliknya. Maka, masyarakat dapat menerima dengan baik keberadaan mereka dan menjalin hubungan yang harmonis di dalam lingkungannya.⁸⁸

Secara sosiologis, permasalahan mendasar dari disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparat pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara.⁸⁹ Ini akan menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan advokasi isu disabilitas ke berbagai lintas sektor, karena isu disabilitas ini merupakan isu lintas sektor dimana semua harus terlibat dalam pembangunan. Disabilitas terjadi karena ada beberapa faktor, diantaranya; kelahiran bayi yang prematur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaifullah Puteh Forum Bangun Aceh (FBA) selaku Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar menyatakan bahwa:

“Disabilitas itu bisa terjadi mungkin ada yang bawaan dari lahir, faktor kesehatan, lahir secara prematur, karena anak-anak yang lahir secara prematur rentan menjadi disabilitas karena perkembangan yang belum sempurna, seperti folio.”⁹⁰

⁸⁸ Serista Silnya Joste, “Penyesuaian sosial (social Adjustment) Pada Mahasiswa Disabilitas”, hlm. 22-23.

⁸⁹ Fajri Nursyamsi, *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesi Ramah Disabilitas*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015), hlm. 11.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

Melalui hasil wawancara diatas bahwa salah satu penyebab disabilitas terjadi karena kalahiran prematur yang menyebabkan adanya kelainan pada bayi tersebut. Anak-anak yang lahir secara prematur belum saatnya untuk hadir ke dunia sangat rentan menjadi disabilitas, karena perkembangan yang belum sempurna. Faktor lain yang dapat menyebabkan disabilitas dapat terjadi karena mengalami kecelakaan, baik kecelakaan kerja maupun lalu lintas. Disamping itu faktor kesehatan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi disabilitas, karena mengalami masalah kesehatan yang timbul sejak lahir, kekurangan gizi.

Berdasarkan berbagai kondisi yang dialami oleh orang dengan disabilitas, dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya sulit dalam melakukan interaksi sosial. Hambatan ini muncul karena adanya stigmanisasi yang menyebabkan mereka berada dalam situasi dan kondisi menjadi penyebab terjadinya bentuk-bentuk perlakuan diskriminatif terhadap orang dengan disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syaifullah Puteh selaku Fasilitator Lapangan Forum Bangun Aceh (FBA) di Wilayah Aceh Besar menyatakan bahwa:

“Di Aceh sendiri, masih sangat diskriminatif terhadap disabilitas, di daerah perkampungan masih banyak orang yang memanggil mereka dengan luntung, karena masih belum adanya pemahaman secara baik tentang orang dengan disabilitas.”⁹¹

Hasil wawancara menyatakan bahwa di Aceh masih sangat diskriminatif terhadap kehadiran disabilitas, terutama di daerah perkampungan yang masih banyak menyebut mereka luntung. Perlakuan seperti ini yang terus-menerus mereka dapatkan akan membuatnya semakin tidak ingin keluar dari kurungan masyarakat.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

Berada di situasi tersebut membuat rasa percaya diri mereka semakin rendah. Belum adanya pemahaman secara baik tentang orang disabilitas membuat masyarakat berfikir bahwa mereka hanya menjadi beban tersendiri bagi keluarga, masyarakat dan negara maka pola pikir tersebut harus dirubah.

Diskriminasi karena disabilitas berujung pada marginalisasi dari sumber daya dan pembuatan keputusan, dan bahkan pada kematian. Tidak banyak negara yang memiliki informasi tentang berapa banyak warganya yang merupakan penyandang disabilitas, disabilitas macam apa yang mereka alami dan bagaimana disabilitas ini memengaruhi kehidupan mereka.⁹²

Diskriminasi yang terjadi dapat dilihat dari berbagai sudut dan sangat berdampak, mulai dari segi pembangunan, pendidikan, pekerjaan, sampai layanan kesehatan. Pembangunan yang masih tidak inklusi membuat kalangan masyarakat sulit mengaksesnya, tidak hanya orang dengan disabilitas melainkan orang hamil dan lansia. Kurangnya pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi disabilitas, maka mereka akan semakin terpinggirkan. Disabilitas seharusnya berhak mendapatkan pemenuhan hak dasarnya walaupun implementasinya berbeda dengan kebutuhan orang tidak dengan disabilitas. Dalam hal ini beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“Sehingga karena pembangunan yang tidak memihak kepada disabilitas menjadikan mereka tidak dapat mengakses pendidikan karena pembangunan yang tidak dapat mereka jangkau. Dampaknya, ketika mereka tidak sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi dan memadai, mereka juga tidak mendapatkan akses pekerjaan yang pantas. Apabila mereka tidak memiliki pekerjaan dan

⁹² Sugeng Pujileksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 206.

pendapatan, maka mereka disebut sebagai kelompok miskin.”⁹³

Pembangunan yang tidak memihak kepada disabilitas akan mengakibatkan mereka termarginalkan. Pada perguruan tinggi di Aceh khususnya dari segi pembangunan belum akses disabilitas, sehingga mereka sulit untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian pembangunan pada instansi pemerintah yang belum akses terhadap disabilitas, yang mana pada dunia pekerjaan sudah disebutkan di dalam undang-undang untuk mempekerjakan disabilitas sebanyak 2%. Tidak hanya itu, pada saat proses rekrutmen tenaga kerja salah satu yang menjadi syaratnya adalah sehat jasmani dan rohani akibatnya mereka langsung merasa rendah diri karena mereka dianggap tidak sehat jasmani.

Berbagai pembangunan yang di bangun bersifat eksklusif, artinya tidak memihak kepada orang dengan disabilitas. Kemudian pendidikan yang mereka dapatkan tidak maksimal, mempunyai kesempatan yang sangat minim pada dunia pekerjaan. Tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup mereka tetapi ekonomi mereka juga terdampak. Permasalahan ini muncul karena di dalam lingkungan disabilitas sering dianggap tidak ada, seperti yang dikatakan oleh Ibu Zulvia Maika Letis (Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebral Palsy (Yayasan Sahabat Difabel Aceh) pada hasil wawancara bahwa:

“Permasalahan yang sering dihadapi oleh mereka di lingkungan sering dianggap tidak ada, sebenarnya mereka ini ada, malah mereka rame. Sehingga disebut sebagai (Disabilitas yang tidak terlihat). Sangat banyak di masyarakat kita ini yang mengalami disabilitas, baik disabilitas berat maupun ringan. Seharusnya lingkungan juga jangan menjauhi mereka, jangan mengucilkan mereka. Sehingga mereka merasa didiskriminasi secara tidak

⁹³ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 16 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

langsung. Seharusnya paradigma masyarakat ini yang harus diubah.”⁹⁴

Dalam membicarakan isu disabilitas tentu saja sudah tidak asing. Paradigma masyarakat terus bermunculan dengan berbagai sudut pandang. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang mendasar atas tindakan yang dibuat oleh manusia. Disabilitas juga merupakan warga negara yang sama dengan warga negara lainnya. Namun keberadaan disabilitas kerap sekali diabaikan, pelanggaran HAM terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai warga negara, bahkan tidak dianggap manusia. Posisi mereka rendah di dalam masyarakat sehingga selain mengalami keterbatasan akses, disabilitas juga terasingkan. Mulailah untuk menerima dan mencintai orang dengan kedisabilitasnya, maka secara tidak sadar kita belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Salah satu orang dengan disabilitas yang saya jumpai pada waktu itu, namanya ialah Erlina Marlinda biasa dipanggil Elin. Elin menceritakan banyak mengenai hal yang dihadapinya pada saat kecil, meranjak dewasa, sampai saat ini sudah dewasa. Elin juga menceritakan hambatan yang dirasakannya, cara dia keluar dari zona amannya sampai perihal sosialisasi isu disabilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, menyatakan bahwa:

“Ketika elin berusia 13 tahun, pada saat itu naik kelas 2 SMP saya merasa minder ketika bertemu dengan orang-orang karena tidak bisa berjalan. Pada saat itu saya mempunyai rasa malu karena ketika naik mobil harus diangkat. Tetapi jika cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang atau tamu yang datang kerumah biasa saja. Timbulnya rasa malu dan minder ketika harus ada mobilisasi, yaitu harus berpindah tempat dari tempat yang

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Zulvia Meika Letis (Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebal Palsy Yayasan Sahabat Difabel Aceh), Pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB

satu tempat yang lain. Misalnya dari kursi roda pindah ke mobil harus di angkat. Ketika dewasa, saya tidak berani keluar rumah untuk jalan-jalan”.⁹⁵

Kemudian Erlina Marlinda menceritakan hambatan yang dialaminya pada masa itu, menyatakan bahwa:

“Hambatan yang saya alami waktu kecil merasa berbeda, jadi ada kondisi di bully pada saat itu kemudian saya mundur untuk berteman dengan mereka”.⁹⁶

Pada saat itu elin itu juga menceritakan hambatan yang harus dibongkar dalam dirinya maupun untuk orang dengan disabilitas lainnya dengan menerapkan pola pikir yang dapat memotivasi diri. Elin menyatakan bahwa:

“Hambatan yang saya alami selama menjadi disabilitas ketika belum bisa menerima dan membongkar permasalahan dari diri kita masih banyak sekali hambatan yang akan didapatkan. Hambatan yang pertama ialah tidak berani mengungkapkan pendapat, tidak berani berhadapan dengan orang banyak, masih punya anggapan bahwa jika keluar dari lingkungan atau zona amannya pada diejekin. Hal itu akan muncul jika kita belum selesai dari semua permasalahannya, dalam artian belum bisa menerima keadaan sebagai disabilitas. Ketika masih memiliki pemikiran “orang mana mau menerima orang dengan disabilitas” berarti masih harus ekstra untuk mengenali diri sendiri lebih jauh. Apabila sudah bisa membongkar dan melepas permasalahan yang kita hadapi mungkin hambatan itu tidak kental lagi. Justru orang sebagai disabilitas yang menjadi pelau berfikir bagaimana mengubah yang kemarin

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, Pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 14.10 WIB

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, Pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 14.10 WIB

menjadi hambatan sekarang menjadi motivasi untuk kita mengubah pola pikir orang.”⁹⁷

Elin juga menceritakan bagaimana dia bisa keluar dari zona amannya selama ini. Faktor utama pendukungnya untuk percaya bahwa dia mampu melakukan semua secara mandiri ialah dukungan dari keluarganya. Kedua orang tuanya sangat mendukung penuh terhadap perkembangannya, mendukung hal apapun yang diambil oleh elin. Keluarganya juga tidak pernah mengekang dan menyembunyikan keberadaan elin karena disabilitasnya, sehingga elin mulai melakukan perubahan terhadap dirinya secara perlahan. Elin menyatakan bahwa:

“Keluarga adalah orang yang menjadi supporter pertama dan utama ketika ingin melakukan perubahan, selain keluarga barulah orang-orang yang mengenal kita yang memotivasi kita yang menjadi supporter kedua. Diluar dari keluarga, merekalah yang menjadi pendukung utama untuk mensupport kita dalam proses perubahan. Pasca tsunami tahun 2004 saya mulai melakukan perubahan terhadap diri sendiri.”⁹⁸

Pasca tsunami sekitar awal tahun 2005 elin mulai bergabung dengan salah satu NGO asing sebagai role model dalam program mereka untuk pemberdayaan disabilitas. Pada waktu itulah dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan proses perubahan. Seiring berjalannya waktu ketika awal bergabung memiliki rasa malu dan tidak berani menjadi berani karena sudah beberapa kali mengikuti kegiatan yang telah di buat oleh mereka. Elin dapat mengenal orang lebih jauh dan merasakan menjadi seperti orang kebanyakan. Berdasarkan hasil wawancara elin menyatakan bahwa:

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, Pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 14.10 WIB

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, Pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 14.10 WIB

“Banyak organisasi yang meminta kak elin untuk bergabung dengan mereka. Awalnya kak elin tidak mengenal organisasi. Pertama kali kak elin mengenal organisasi itu adalah handicap internasional. Kemudian setelah dari situ HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) meminta kak elin untuk bergabung dengan mereka, dan akhirnya jadi ketua 2 di tempat tersebut. Selesai dari handicap internasional, kak elin dimintai oleh leonal ceseart disability bangkok untuk menjadi fasilitator disabilitas young voice untuk aceh. Setelah dari situ kak elin mendirikan yayasan children and youth disability for change yang didirikan juga oleh alumni-alumni young voice konsennya untuk memperjuangkan isu disabilitas khususnya untuk angkatan anak muda. Ketika kak elin di young voice di percayakan oleh jakarta untuk menerima mandat sebagai ketua vederasi FKPCTI (Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia) sekarang menjai PPDFI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia).”⁹⁹

Pada saat itulah elin terus melakukan proses belajar sebaik mungkin agar dapat melakukan penerimaan terhadap dirinya, dapat melakukan sesuatu secara mandiri, dapat menunjukkan bahwa walaupun sebagai disabilitas dapat menciptakan sesuatu dan menjadi sesuatu yang luar biasa sama seperti orang kebanyakan. Disamping itu, ketika sudah dapat melakukan semuanya secara mandiri tidak ada lagi terfikirkan bahwa dengan kondisinya menjadi beban keluarga, bahkan sekarang sudah dapat membahagiakan keluarganya dan membuat keluaganya bangga atas capaian yang telah diraih dari awal hingga sekarang.

Banyaknya bergabung dengan dengan berbagai organisasi dapat menambahkan wawasan dan jaringan sosial bahkan dalam berkomunikasi. Disamping itu juga mengenal banyak hal di luar sana dari awalnya yang tidak mengetahui banyak tentang dunia

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, Pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 14.10 WIB

luas. Hasil yang di dapatkan selama ini juga dapat di share kembali dengan orang disabilitas agar mereka mendapatkan pengetahuan tambahan. Dukungan yang hadir tidak hanya dari keluarga dan orang di dalam organisasi melainkan lingkungan juga sangat berpengaruh untuk melakukan perubahan terhadap disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erlina Marlinda menyatakan bahwa:

“faktor utamanya tetap dari lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh. Masyarakat menjadi orang yang merasakan langsung kehadiran disabilitas, tetapi mereka bukan pelaku langsung seperti menciptakan program. Ketika mereka menerima disabilitas, maka perubahan itu akan dapat terjadi.”¹⁰⁰

Orang dengan disabilitas tentunya selalu mengalami hambatan dalam berbagai aspek. Mereka tidak akan mengalami hambatan apabila hambatan tersebut sudah teralisasikan dengan baik. Hambatan dari lingkungan sangat berpengaruh ketika menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat. Penerimaan masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi secara penuh akan menjadi hambatan dari segi lingkungan. Pada saat masyarakat menerima dan masyarakat memahami orang dengan disabilitas, maka semua kebijakan yang sudah diatur dapat berjalan dengan sesuai. Hambatan tidak akan berakhir apabila faktor internal dan eksternal tidak berjalan beriringan.

Melakukan proses pemberdayaan sebagai bentuk proses perubahan sosial agar dapat mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Pemberdayaan juga dapat membentuk proses perubahan perilaku pada diri seseorang dan meningkatkan ekonomi dalam jangka panjang secara bertahap serta mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupannya. Upaya pemberdayaan semestinya memfasilitasi dan

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda, Pada tanggal 24 Januari 2021, Pukul 14.10 WIB

mendorong masyarakat untuk mampu berproduksi secara efisien dan menjamin pemenuhan pangan serta memperoleh surplus yang dapat dipasarkan.¹⁰¹

Partisipasi dari masyarakat sangat penting untuk mendukung pengembangan pemberdayaan terhadap disabilitas. Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.¹⁰²

Disabilitas mampu membangkitkan dirinya kembali secara penuh dan efektif ketika partisipasi masyarakat tersebut mendukungnya. Sehingga mereka dapat berleluasa menjalani aktivitas sosialnya di dalam masyarakat. Disabilitas dapat merobohkan rintangan-rintangannya seperti stigma, diskriminasi, dan hambatan yang dialami. Aspek perubahan akan terjadi di dalam lingkungan masyarakat mulai dari sikap masyarakat terhadap orang dengan disabilitas yang menghambat kemandirian dan pengembangan dirinya.

Berbagai fenomena yang terjadi terhadap penyandang disabilitas dari perspektif psikologi sosial dan sosiologi melihatnya

¹⁰¹ Totok Mardikanto, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, hlm. 73-76.

¹⁰² Totok Mardikanto, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 81-91.

sebagai permasalahan yang ada dalam sistem sosial. Sistem sosial ini terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang dan selalu ada hubungan timbal balik. Namun realitas sosialnya mereka jarang menemukan *feedback* yang mengarah kepadanya atas dasar kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Pentingnya memberikan pengetahuan kepada semua lapisan agar mereka dapat melaksanakan perannya dengan baik sehingga mendorong kelangsungan disabilitas menjadi lebih baik.

C. Peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam Pemberdayaan Disabilitas di Aceh Besar

Perilaku manusia adalah sebagai fungsi dari interaksi antar individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Ini semua merupakan karakteristik yang dimiliki individu, dan karakteristik ini akan dibawa olehnya pada saat akan memasuki sesuatu lingkungan baru.¹⁰³ Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial karena individu-individu di dalam kelompok masyarakat saling berinteraksi atas dasar status dan peranan sosial yang diatur sebagai seperangkat norma dan nilai atau tatanan sosial. Salah satu tatanan sosial adalah masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak bisa melepaskan diri dari ketergabungan pada masyarakat. Perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain sehingga merupakan tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.¹⁰⁴

Sistem sosial sebagai hubungan antara bagian di dalam kehidupan masyarakat terutama tindakan-tindakan manusia, lembaga sosial, dan kelompok-kelompok sosial yang saling

¹⁰³ H. Candra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017), hlm. 3.

¹⁰⁴ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 1-4.

memengaruhi. Lembaga sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan lembaga sosial yang memiliki wewenang dapat menjalankan peranan sesuai kedudukannya dengan baik.

Lembaga sosial ini di bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan lembaga sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan tersebut bermacam-macam sehingga akan melahirkan bermacam lembaga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut.¹⁰⁵

Pemberdayaan dan masyarakat dua sisi yang saling ketergantungan. Kaitannya dengan masyarakat dalam pemberdayaan adalah adanya keberfungsian sosial masyarakat dalam pemberdayaan. Artinya semua orang atau individu memiliki potensi masing-masing untuk dikembangkan kepada arah yang diinginkan.¹⁰⁶ Pemberdayaan yang dilakukan terhadap disabilitas sebagai upaya menguatkan keberadaannya dalam pengembangan potensi sehingga mampu menjadikan individu yang mandiri. Kelompok yang berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan suatu lembaga sangat penting untuk mendorong perkembangan memberdayakan disabilitas.

Berikut lampiran hasil dari peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam melakukan pemberdayaan terhadap disabilitas.

¹⁰⁵ Nora Susilawati, *Sosiologi Pedesaan*, (Padang: Buku Bacaan Perkuliahan Universitas Negeri Padang, 2012), hlm. 42.

¹⁰⁶ Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, (Banda Aceh: ArraniryPress, 2012), hlm. 22.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jenis Disabilitas	kecamatan	Jenis intervensi yang di peroleh	Kondisi sebelum intervensi FBA	Setelah intervensi FBA
1	Nasri	LK	Daksa kaki	Sukamakmur	Bantuan alat kerja	tidak memiliki usaha, hanya hidup dari belas kasihan orang lain	Sudah memiliki usaha bengkel service sepeda dan sepeda motor
2	Suryani	PR	Rungtu Wicara	Kueng Barona Jaya	pelatihan menjahit	tidak memiliki kegiatan usaha, hanya ibu rumah tangga	sudah memiliki usaha jasa menjahit di rumahnya dan sudah mulai menerima orderan jahitan dari masyarakat luas
3	Oni saputra	LK	Daksa/Cerebral palsy	Montasik	bantuan modal usaha kios	sebelumnya sudah memiliki kios namun dengan barang seadanya dan sangat minim	kiosnya sudah berkembang dan sudah mengalami peningkatan penjualan
4	Muhammad	LK	Daksa kaki	Blang Bintang	Bantuan Pijat Refleksi	belum memiliki skill dan pekerjaan	sudah membuka usaha pijat refleksi dan sudah mulai ramai pelanggan
5	Yusran	LK	Daksa kaki	Darul Kamal	pelatihan service Handphone	belum bekerja	sudah membuka usaha service HP di tempat tinggalnya dan sudah mulai ramai pelanggan
6	Sariyanti	PR	Daksa kaki	Ingin Jaya	pelatihan menjahit	tidak memiliki usaha dan bahkan tidak pernah keluar rumah	membuka usaha menjahit dan sudah mulai banyak orderan

Sumber: Dokumentasi hasil peran Forum Bangun Aceh (FBA)

Berdasarkan penelitian pada tanggal 02 Februari 2021 jam 09.30. Peneliti bertemu dengan staf *Community Organizer* di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Peneliti melakukan serangkaian wawancara seputar pertanyaan yang ingin peneliti tanyakan adalah bagaimana peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar.

Kemudian Ibu Mikraj selaku CO (*Community Organizer*) Forum Bangun Aceh mengatakan bahwa:

“Peran FBA terhadap disabilitas membuat program ACBID yaitu pemberdayaan ekonomi dan sosial sisabilitas. Program ini tahap pemula di aceh sebagai program pemberdayaan disabilitaas dan inklusi sosial. Kita melakukan hal-hal sampai sekecil-kecilnya, melakukan advokasi ke pemerintah, level desa, stakolder yang mempunyai wewenang kemudian bersinergi di lapangan dengan berbagai unsur yang berperan di bidang sosial di dalam masyarakat seperti TKSK (sebagai perantara dinas sosial dilapangan), PLD (pendamping desa yang berperan mengelola dana desa), keuchik dan pemerintah. Pihak konsultasi yang sangat berperan adalah PLD, jadi kita disitu advokasi keuchik dgn dukungan PLD dan pemerintah. Dalam program ini membentuk KSM di desa sebagai *role model* kelompok dengan tujuan memberikan kesempatan untuk disabilitas berbicara, menjadi pengurus, dilibatkan dalam masyarakat. Agar kelompok lain dapat melihat kemampuan disabilitas yang dimiliki, mereka tidak hanya dirumah saja.”¹⁰⁷

Dapat dijelaskan bahwa FBA berperan untuk melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi terhadap disabilitas agar mereka dapat mengontrol kehidupannya secara mandiri dan membentuk masa depan yang lebih baik. Advokasi merupakan salah satu langkah yang efektif dalam menyuarakan isu disabilitas dengan orang-orang pengambil kebijakan. Kemudian FBA ingin

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Mikraj, Bidang Community Organizer FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

memberikan disabilitas kesempatan di dalam masyarakat berdasarkan hak dan kesempatan yang mereka miliki. KSM inilah menjadi wadah untuk menonjolkan disabilitas di dalam masyarakat bahwa mereka mampu berinteraksi dengan sesama masyarakat lain dan kelompok lain dapat melihat kemampuan yang dimiliki mereka.

Secara terminologi, masyarakat dapat dikatakan sebagai sekumpulan individu yang didalam kegiatannya saling berinteraksi, saling berasimilasi dan berakulturasi, sehingga suatu masyarakat menjadi berkembang dan teratur dengan adanya sistem dan struktur tertentu yang sesuai dengan tradisi dan kebudayaan lingkungannya. Biestek menyampaikan bahwa prinsip *self-determination* ini intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang di hadapi, sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.¹⁰⁸

Namun mengenai ekonomi, pendidikan, dan sosial dalam upaya meningkatkan prestasi anak-anak Aceh, pendapatan masyarakat aceh dan disabilitas terus dilakukan oleh FBA, karena selama ini bekerja untuk itu semua khususnya disabilitas. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Mukhsir Ridha selaku CO (*Community Organizer*) memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Peran FBA (Forum Bangun Aceh) secara keseluruhan yaitu meningkatkan ekonomi rakyat/masyarakat aceh secara pendapatan. Kemudian pendidikan, harapan FBA anak-anak aceh dapat sekolah, berprestasi, dan mendapatkan beasiswa. Segi sosial khususnya disabilitas terus bekerja dalam semua aspek dan kegiatan baik level desa, kecamatan maupun kabupaten melibatkan disabilitas karena mereka mempunyai hak yang sama dengan orang tidak dengan

¹⁰⁸ Sabirin, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lokal*, (Banda Aceh: ArraniryPress, 2012), hlm. 20-21.

disabilitas dan mereka juga berhak mendapatkan fasilitas yang berhak mereka dapatkan dari negara.”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa FBA melakukan perannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat meningkatkan mutu pendidikan terhadap anak-anak di Aceh. Dari segi sosial, khususnya disabilitas mereka selalu melakukan upaya agar orang dengan disabilitas mendapatkan dan merasakan fasilitas yang seharusnya diberikan dari negara. Banyaknya kegiatan dari semua aspek yang terus mereka lakukan dalam bekerja, dari level desa sampai kabupaten.

Walaupun segi sosial sudah dilakukan, secara ekonomi juga harus dibentuk. Keluarga tentunya harus mendukung dan mulai adanya penyadaran terhadap kebutuhan anak dengan disabilitas. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Syaifullah Puteh selaku Fasilitator Lapangan Forum Bangun Aceh (FBA) di Wilayah Aceh Besar bahwa:

“Peran FBA adalah menjadikan disabilitas mandiri secara sosial, artinya mereka mengetahui hak mereka sebagai disabilitas ketika sudah mengetahui dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat secara umum. Strategi yang dilakukan adalah memberikan penyadaran sosial kepada disabilitas dengan pendidikan, penyadaran dan juga melakukan pendekatan-pendekatan terhadap keluarga. Keluarga berperan penting dalam melakukan strategi pemberdayaan terhadap disabilitas itu sendiri. Secara ekonomi perannya adalah kepada *livelihood* dan pemberdayaan. *Livelihood* lebih kepada pendidikan, operasional, pendidikan skill, pelatihan terhadap disabilitas. Pemberdayaan lebih kepada pengembangan ekonomi kepada disabilitas itu sendiri.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Mukhsir Ridha, Bidang Community Organizer FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh, Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan FBA ingin menjadikan disabilitas mandiri secara sosial agar mereka mengetahui haknya sebagai disabilitas. Dalam melakukan semuanya dibutuhkan strategi agar pemberdayaan itu dalam berjalan secara maksimal. Secara ekonomi mereka ingin melakukan pengembangan ekonomi terhadap orang dengan disabilitas, baik dari pelatihan, training skill, dan sebagainya.

Pemberdayaan ini dilakukan atas dasar kemauan dan keingintahuan. Lembaga ini sebagai motivator dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh disabilitas. Dengan begitu, munculnya harapan dari lembaga tersebut bahwa ketika lembaga ini tidak lagi mengayomi mereka, maka orang dengan disabilitas sudah cukup mampu mengatasi semua permasalahan dan melakukan berbagai kegiatan secara mandiri.

Bentuk pemberdayaan ini ialah *livelihood* yang dilaksanakan sebagai pelatihan terhadap disabilitas agar dapat melakukan pengembangan ekonomi disabilitas itu sendiri. Pelatihan dan pengembangan merupakan dua istilah yang saling berhubungan, dan dimaksudkan untuk merencanakan suatu desain dalam memudahkan peningkatan keahlian, pengetahuan, sikap dan perilaku.¹¹¹ Potensi manusia perlu dikembangkan melalui proses pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan manusia seutuhnya atau manusia yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan sasaran pembangunan. Salah satu sasaran yang perlu dibangun adalah daya yang bersumber dari manusia dan manusia yang menghasilkan daya itu harus dibangun atau dikembangkan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam

¹¹¹ Diana Harding, dkk, "Pelatihan dan Pengembangan SDM sebagai Salah Satu Upaya Menjawab Tantangan Mea", *Jurnal Psikologi Sains dan Profesi Nomor 2*, (2018), hlm. 188.

meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan, pendidikan dan pengembangan.¹¹²

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Novi Indriany bidang *Community Organizer* beliau juga mengatakan bahwa:

“Peran FBA yaitu lebih melakukan pendampingan terhadap sosial, misalnya dulu ada disabilitas yang kami kunjungi belum pernah keluar rumah sama sekali. Setelah kami datang dan melakukan pendekatan dengan disabilitas dan keluarganya, membuat dia nyaman dengan kita. Kemudian melakukan kunjungan berkali-kali hingga ia percaya dengan kita, mengenal kita lebih dekat setelah itu mengajarkannya mengobrol keluar di depan rumah. Kemudian melakukan advokasi kepada tetangga-tetangganya di lingkungan sekitar agar tidak menjadi bahan ulok-ulok dan malah mensupport disabilitasnya, jangan dianggap seperti orang asing hingga mereka mau mengajak disabilitas untuk berbicara, bercengkrama. Setelah itu selesai dari segi sosialnya selanjutnya baru mulai pada bidang ekonomi sesuai keinginan mereka untuk membuat mereka bisa mandiri, terutama saat orang tua mereka tidak ada gimana cara agar mereka dapat melanjutkan hidup untuk mendapatkan penghasilan dan membuka pikiran mereka.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara FBA melakukan perannya untuk melakukan pendampingan sosial terhadap disabilitas agar mereka ingin melakukan aktivitas sosialnya bersama masyarakat sekitar dan tetangganya. Kemudian mereka juga melatih kemandirian disabilitas secara ekonomi agar mereka dapat menghidupkan dirinya. Disabilitas juga merupakan masyarakat sosial yang memiliki potensi dalam pengembangan kemampuan yang harus dikembangkan, melalui FBA inilah mereka bisa

¹¹² H. Hasan Basri, dkk, *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 14-15.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Novi Indriany, Bidang *Community Organizer* FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

memanfaatkan peluang yang telah diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan yang harus mereka rasakan.

Dorongan dan semangat yang kuat untuk maju merupakan modal utama dalam mengembangkan keterampilan di tengah masyarakat. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun keterampilan kepada masyarakat, terutama disabilitas. Dengan adanya program ini para disabilitas merasa sangat diberdayakan melalui kegiatan yang positif, membangun kemandirian, dan memberikan tambahan pengetahuan sehingga dapat menciptakan peluang wirausaha yang kreatif dan mandiri.¹¹⁴

Keterampilan yang diberikan kepada disabilitas untuk meningkatkan perekonomian mereka, FBA memberikan pelatihan sesuai apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka memberikan bantuan dalam bentuk ternak hewan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Cut Hendra Irawan:

“Peran FBA yaitu melibatkan disabilitas hadir dan bergabung dalam KSM, dimana disabilitas memiliki keterbatasan, mempunyai rasa malu, dan tidak percaya diri. Sehingga kita membawa mereka ke dalam kelompok ini agar mereka dapat bersosialisasi dengan kelompok. Kemudian jika disabilitas mempunyai usaha mereka bisa dibantu membelikan kebutuhan dalam usahanya melalui kelompok KSM ini. Selain itu membuat disabilitas keluar dari lingkungan keluarganya dan berada di lingkungan yang baru kemudian menambah pendapatannya setelah mereka sudah bekerja. Selain itu memberikan bantuan dalam bentuk ternak itik, kambing, alat-alat menjahit, dan

¹¹⁴ Imran Ukkas, “Pengembangan SDM Berbasis Pelatihan Keterampilan dan Perberdayaan Pemuda”, *Prosiding Seminar Nasional Nomor 1*, (2017), hlm. 120-123.

sebagainnya. Semua ini diberikan sesuai apa yang mereka inginkan.”¹¹⁵

FBA ingin melibatkan disabilitas dalam kelompok swadaya masyarakat agar mereka mampu membongkar rasa ketidakpercayaan terhadap dirinya dan keluar dari masalah dirinya yang menghambat perkembangan mereka sendiri. Untuk menambahkan pendapatannya, mereka dapat memanfaatkan hasil dari pelatihan yang telah didapatkan selama 3 bulan dan terus dikembangkan untuk dijadikan usaha. Pelatihan yang di dapatkan baik menjahit, membuat kue, dan beternak hewan.

FBA memberikan bantuan dalam bentuk ternak ini karena memiliki nilai yang dapat dilakukan dalam jangka panjang. Sehingga ketika FBA tidak lagi bekerja dalam mendampingi mereka, disabilitas sudah melakukan semuanya secara mandiri untuk melanjutkan kehidupannya dan mereka tidak lagi menjadi orang yang akan terus ketergantungan pada orang lain. Berdasarkan semua yang telah diberikan oleh FBA sangat diharapkan semua usaha yang telah dilakukan secara maksimal, termasuk KSM yang di bentuk oleh FBA dalam setiap desa dapat terus dikelola dengan baik oleh masyarakat baik orang dengan disabilitas maupun masyarakat pada umumnya yang juga terlibat di dalamnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua *staf community organizer* bahwa peran FBA adalah membangun ekonomi masyarakat aceh, khususnya disabilitas agar mereka dapat hidup lebih baik. Kemudian FBA terus bekerja dalam melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap semua unsur dan berbagai pihak agar semua kalangan masyarakat dapat menghargai dan memberikan kesempatan yang sama bagi disabilitas. FBA juga melakukan pendekatan terhadap disabilitas dan keluarganya agar disabilitas mampu untuk melakukan interaksi di dalam lingkungan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Cut Hendra Irawan, Bidang Community Organizer FBA, Pada tanggal 02 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB

masyarakat dan keluar dalam lingkungan keluarga. Dimana keluarga juga harus mendukung penuh untuk mereka dapat keluar dari permasalahan sosialnya. Mereka ingin membuat disabilitas berdaya, kreatif, aktif, dan mandiri. Disamping itu, FBA juga mengharapkan orang dengan disabilitas mendapatkan hak sosial dan hak ekonominya secara penuh.

FBA juga dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan disabilitas, dimana mereka mendampingi disabilitas untuk penerima manfaat dalam program yang telah dibuat oleh FBA. Kemudian sebagai motivator bagi disabilitas dan keluarganya untuk mendorong dan membentuk mereka menjadi orang yang berdaya dalam melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Selain itu juga disabilitas dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

Hadirnya FBA dan melalui programnya membawa disabilitas dapat membentuk kepemimpinan diri. Dengan kata lain mereka dapat mengerjakan sesuatu atau pekerjaan yang dijalankan secara efektif dan efisien, karena mereka sudah dapat manajemen diri mereka sendiri dengan tertata. Dengan adanya manajemen diri dapat mendorong serta mendukung munculnya kreativitas. Terdapat beberapa komponen munculnya kreativitas, yaitu karena adanya keahlian, motivasi internal, dan keterampilan kreatif. Kepemimpinan diri dapat mengelola dan menumbuhkan motivasi internal.¹¹⁶

Berdasarkan kreativitas yang mereka miliki dapat meningkatkan upaya pengembangan keahliannya dengan melakukan pemberdayaan terhadap mereka. Hal ini merupakan proses pembangunan masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri. Pemberdayaan

¹¹⁶ Siswanto dan Agus sucipto, *Teori & Perilaku Organisasi: Sebuah Tinjauan Integratif*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 205-206.

ini sangat membantu disabilitas atas kesempatan/keterlibatan, pengetahuan dan keahlian yang mereka dapatkan untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menentukan masa depan sehingga mereka menjadi masyarakat yang memiliki sumberdaya dan bersumber daya masyarakat. Berdasarkan semua yang di dapat disinilah mereka mulai berproses, tidak hanya dalam relasi sosial namun ekonomi juga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Forum Bangun Aceh, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dialami Disabilitas

Disabilitas juga mengalami bentuk diskriminasi, seperti pada saat melamar pekerjaan salah satu syarat yang harus dilampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Menganggap kondisi disabilitas sebagai orang sakit dan tidak sehat. Kemudian dalam bentuk desain dan konstruksi yang belum aksesibel dan sifatnya belum inklusi sehingga disabilitas tidak dapat melakukannya secara mandiri dan membuat mereka ketergantungan terhadap orang lain, seperti perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan sebagainya.

Disabilitas juga tidak memiliki pendidikan karena keluarga yang memiliki anak disabilitas kebanyakan menyembunyikannya sehingga mereka tidak menyekolahkanya, kurangnya pemahaman terkait disabilitas sehingga keluarga tidak melakukan upaya untuk memberikan pendidikan dan terapi sejak mereka kecil, tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal karena keluarga tidak mensupport untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh disabilitas. Disamping itu keluarga malu memiliki anak dengan disabilitas, sehingga mereka dilarang keluar rumah. Dampaknya mereka tidak dapat bekerja dan itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi disabilitas dalam menjalankan kehidupannya. Dampak sosialnya bagi disabilitas mereka tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti Musrembang, mendapat perlakuan *bullying*, banyak orang yang memandang mereka rendah, dianggap

bahwa disabilitas tidak dapat melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh orang pada umumnya.

2. Program-Program yang Dilakukan FBA dan Hasilnya

FBA membuat program ACBID (*Aceh Community Based Inclusive Development*) yaitu pembangunan inklusi berbasis bersumberdaya masyarakat Aceh. Dimana FBA memberikan pendampingan melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi terhadap disabilitas. Hal yang dilakukan dalam pemberdayaan, yaitu Assesment, pelatihan/magang, mencari/memberikan pekerjaan, dan monitoring. Fokus komponen pada program ini adalah melakukan advokasi, ODD (orang dengan disabilitas), dan bermitra dengan organisasi penyandang disabilitas (DPO). Berdasarkan permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi disabilitas, FBA telah mampu memberikan penguatan terhadap para disabilitas dan aparat desa tentang posisi disabilitas dalam masyarakat. Para disabilitas yang di dampingi sudah ada yang bekerja dan dapat melakukan kelangsungan hidupnya secara mandiri. Disabilitas sudah mulai percaya diri, dan memiliki keberanian walaupun belum semuanya. Orang yang berada di lingkungan desa juga sudah mulai peduli dengan kelompok disabilitas ini dan ini hanya terjadi Aceh Besar karena selama ini FBA baru melakukannya disini.

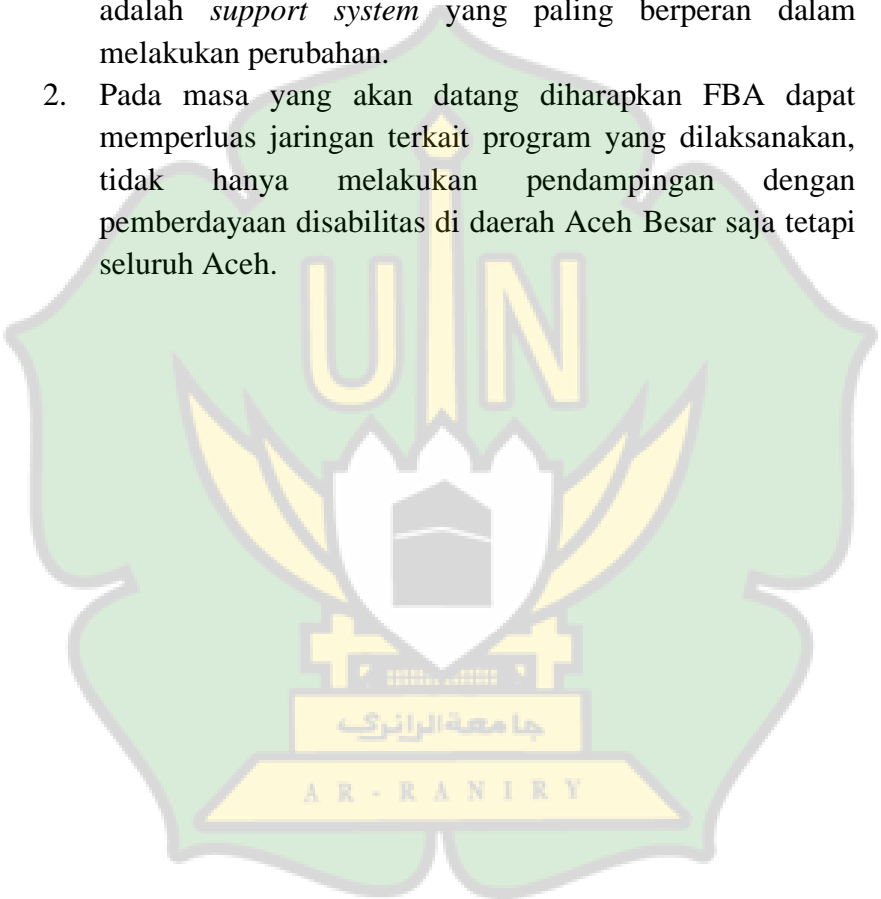
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pemikiran atau pertimbangan untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat sudah seharusnya membuka ruang untuk disabilitas pada setiap kesempatan dan melibatkan disabilitas pada setiap kegiatan maupun pengambilan kebijakan atau keputusan dari tingkat desa sampai pemerintahan. Dalam pengambilan kebijakan harus berdasarkan hasil kesepakatan bersama, karena

disabilitas juga merupakan warga negara yang sama dengan lainnya. Kemudian masyarakat, pemerintah dan stakolder dapat memahami isu disabilitas agar mereka tidak merasakan stigma dan diskriminasi. Disamping itu, keluarga juga harus sering menghadiri sosialisasi dan mencari informasi terkait isu disabilitas karena keluarga adalah *support system* yang paling berperan dalam melakukan perubahan.

2. Pada masa yang akan datang diharapkan FBA dapat memperluas jaringan terkait program yang dilaksanakan, tidak hanya melakukan pendampingan dengan pemberdayaan disabilitas di daerah Aceh Besar saja tetapi seluruh Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwas, Oos M. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan (Metode dan Paradigma Baru)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arifin, Bambang Samsul. *Psikologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Bandur, Agustinus. *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Basri, H. Hasan. dkk. *Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Hartono, Felani Budi dan Isneningtyas Yulianti. *Buku HAM Penyandang Disabilitas Mental Di Panti Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2018.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Musdawati. *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*. Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020.
- Mardikanto, Totok. dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

- Nursyamsi, Fajri. *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesi Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Pujileksono, Sugeng. *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Perspektif Pemenuhan Keahlian dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penilitin Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syaifullah Puteh, Syaifullah. *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*. Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020.
- Sabirin. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Banda Aceh: ArraniryPress, 2012.
- Susilawati, Nora. *Sosiologi Pedesaan*. Padang: Buku Bacaan Perkuliahan Universitas Negeri Padang, 2012.
- Saputro, Sulistyono. dkk. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial, 2015.
- Siswanto dan Agus sucipto. *Teori & Perilaku Organisasi: Sebuah Tinjauan Integratif*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Wijaya, H. Candra. *Perilaku Organisasi*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017.
- Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Jurnal:

- Harding, Diana. dkk. Pelatihan dan Pengembangan SDM sebagai Salah Satu Upaya Menjawab Tantangan Mea. *Jurnal Psikologi Sains dan Profesi. Vol. 2, No. 2, (2018).*
- Ningsih, Ekawati Rahayu. Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian maupun Pengabdian pada Masyarakat di STAIN Kudus. *Jurnal Penelitian. Vol. 8, No. 1, (2014).*
- Pratiwi, Gusti Indah. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Di Pekan Baru. *Jurnal Fisip. Vol. 3, No.1, (2016).*
- Rijali, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah. Vol. 17, No. 33, (2018).*
- Shaleh, Ismail. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20, No. 1, (2018).*
- Saifuddin. dkk. Kewenangan Pemerintah Aceh Besar dalam Pemenuhan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.3, No.2, (2019).*
- Ukkas, Imran. Pengembangan SDM Berbasis Pelatihan Keterampilan dan Perberdayaan Pemuda. *Prosiding Seminar Nasional. Vol. 03, No. 1, (2017).*

Skripsi:

- Darmi. “Peran Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh Dalam Memberdayakan Anak Tunarungu (Studi di SMALB YPAC Banda Aceh)”. *Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry/Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam 2013.*
- Joste, Serista Silnya. “Penyesuaian Sosial (social Adjustment) Pada Mahasiswa Disabilitas”. *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2019.*

- Kamil, Muhamad Ikhsan. “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Magelang”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Priyambodo, Doni Aji. “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Rahajeng, Utami. “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Kaum Difabel”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta/Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 2013.
- Yulisnaini, Eza. “Peran Komunitas Young Voice Dalam Pemberdayaan Disabilitas Di Kota Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry/Program Studi Manajemen Dakwah, 2018.

Website:

- “Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas”. Pada link <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-2016-penyandang-disabilitas> (Diakses Tanggal 02 Desember 2020).
- “Program Disabilitas”. Pada link <https://www.fba.or.id/ksm.html> (Diakses Tanggal 3 Februari 2021).
- “Profil Program Pemberdayaan Ekonomi”. Pada link <https://www.fba.or.id/economic-empowerment.html> (Diakses Tanggal 03 Februari 2021, Pukul 12.30 WIB)
- Media disabilitas, “Penyandang Disabilitas Intelektual”. Pada link <https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-intelektual> (Diakses tanggal 11 Maret 2021).
- “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Kemampuan Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus”. Pada link [84](https://spa-</p></div><div data-bbox=)

pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas (Diakses tanggal 11 Maret 2021).

Hasil wawancara:

Hasil wawancara dengan Nurul Asyura. Bidang Project Koordinator ACBID Forum Bangun Aceh (FBA) pada tanggal 25 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan Asnawi Nurdin. Bidang Program Manager Forum Bangun Aceh (FBA), Pada tanggal 25 Januari 2021.

Hasil wawancara dengan Syaifullah Puteh (Community Organizer FBA) pada tanggal 16 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Mukhsir Ridha (Community Organizer FBA untuk program ACBID) pada tanggal 12 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Cut Hendra Irawan (Community Organizer FBA untuk program ACBID di Kec. Darul Kamal, Aceh Besar) pada tanggal 12 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Mikraj (Community Organizer FBA bagian ACBID) pada tanggal 12 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Novi Indriani, (Community Organizer FBA program ACBID) pada tanggal 02 Februari 2021.

Hasil wawancara dengan Zulvia Meika Letis (Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebral Palsy Yasda) pada tanggal 26 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Erlina Marlinda (Disabilitas) pada tanggal 24 Januari 2021.

DAFTAR PERTANYAAN

Kepada : Forum Bangun Aceh (FBA)

1. Jelaskan latar belakang berdirinya Forum Bangun Aceh (FBA).
2. Apa tujuan Forum Bangun Aceh (FBA) berdiri dan membuat program untuk kelompok penyandang disabilitas?
3. Apa visi dan misi dari Forum Bangun Aceh?
4. Apa saja program yang dibuat oleh Forum Bangun Aceh (FBA) sebagai penunjang untuk kelompok penyandang disabilitas?
5. Bagaimana cara FBA melakukan program ACBID di lapangan?
6. Apakah sebelum melaksanakan program ACBID ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Bagaimana respon atau tanggapannya?
7. Bagaimana sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan penyandang disabilitas?
8. Berapa lama proses pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan disabilitas berlangsung?
9. Apa tindakan lanjutan pasca pelatihan? Bagaimana proses dan mekanismenya?
10. Apa saja hambatan /kendala saat membuat program tersebut dan ketika program tersebut sudah dijalankan?
11. Bersama siapa saja lembaga FBA ini bermitra?
12. Berapa jumlah data per 6 kecamatan yang terdapat disabilitas?
13. Apa permasalahan sosial yang sering dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas? Terutama di wilayah Aceh Besar.

14. Jelaskan sedikit mengenai disabilitas di Aceh Besar dari hasil observasi sebelumnya, khususnya di wilayah kerja FBA.
15. Bagaimana peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam melakukan pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar?

Kepada : Zulvia Maika Letis

Sekretaris yayasan dan Ketua Pengurus Harian Rumah Cerebral Palsy Yasda (Yayasan Sahabat Difabel Aceh).

1. Apa saja permasalahan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas?
2. Apakah pernah ditemukan disabilitas yang diperlakukan tidak layak dalam keluarga pada saat dilahirkan?
3. Apa yang seharusnya dilakukan agar disabilitas tidak mengalami hal-hal yang negatif di dalam lingkungannya?

Kepada : Erlina Marlinda

Seorang disabilitas yang bekerja di Forum Bangun Aceh (FBA).

1. Bolehkah jika menceritakan sedikit apa saja yang kakak alami mulai dari kecil, remaja hingga sampai saat ini?
2. Apa saja hambatan yang kakak alami selama menjadi disabilitas?
3. Bagaimana cara kakak dapat keluar dari zona nyamannya kakak dan menjadi orang yang sangat mandiri seperti sekarang ini?
4. Faktor apa saja yang dapat mendorong untuk keluar dari rumah dan menjadi orang yang berani tampil?
5. Saat ini mulai dari kakak keluar dari zona nyamannya hingga sampai di titik sekarang ini, organisasi apa saja yang kakak bergabung?

DAFTAR NAMA INFORMAN

Nama : Asnawi Nurdin, S.Pd, M.Ed
Umur : 41 Tahun
Alamat : Lamteumen Timur, Banda Aceh
Keterangan : Programme Manager (Manajer Program) Forum Bangun Aceh

Nama : Nurul Asyura
Umur : 34 Tahun
Alamat : Lr. Keutapang Wangi, No. 07 Gampong Peurada
Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh
Keterangan : Coordinator Project untuk Project ACBID (Aceh Community Inclusive Development) Forum Bangun Aceh

Nama : Syaifullah Puteh
Umur : 30 Tahun
Alamat : Gampong Lambhuk, Kec. Ulee Kareng
Keterangan : Fasilitator Lapangan Wilayah Aceh Besar

Nama : Cut Hendra Irawan
Umur : 45 Tahun
Alamat : Lamlumpu, Peukan Bada, Aceh Besar
Keterangan : Community Organizer Forum Bangun Aceh di
Kec. Darul Kamal, Aceh Besar

Nama : Mikraj
Umur : 40 Tahun
Alamat : Pagar Air, Kec. Ingin Jaya, Aceh Besar
Keterangan : Community Organizer Forum Bangun Aceh bagian program ACBID

Nama : Mukhsir Ridha
Umur : 38 Tahun
Alamat : Desa Lueng Ie, Kec. Krueng Barona Jaya, Aceh Besar
Keterangan : Community Organizer Forum Bangun Aceh untuk Program ACBID

Nama : Novi Indriany
Umur : 36 Tahun
Alamat : Desa Tungkop, Darussalam
Keterangan : Community Organizer Forum Bangun Aceh untuk Program ACBID

Nama : Erlina Marlinda
Umur : 42 Tahun
Alamat : Jl. Tuan Keramat No.2, Lamteumen Timur, Banda Aceh
Keterangan : Advocacy Officer

Nama : Zulvia Maika Letis, S.Si, M.Si

Umur : 31 Tahun

Alamat : Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh

Keterangan : Sekretaris Yayasan dan Ketua Pengurus Harian
Rumah Cerebal Palsy Yasda (Yayasan Sahabat
Difabel Aceh)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-728/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2020**

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

- Menimbang:**
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
 - bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Musdawati, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Suci Fajarni, M.A Sebagai Pembimbing II

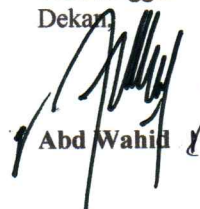
Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Dewi Chrimawati
NIM : 160305040
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Perspektif Komunitas Millenials Empowerment Terhadap Infrastruktur Ramah Disabilitas di Kota Banda Aceh

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Maret 2020
Dekan


Abd Wahid

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN
No. 33/FBA/VI/2021

Dengan Hormat,

Kami dari Forum Bangun Aceh (FBA), sebuah lembaga yang saat ini sedang menjalankan program pemberdayaan orang dengan disabilitas. Dalam hal ini FBA ingin menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Chrismawati
NIM : 160305040
Semester/Jurusan : IX/Sosiologi Agama
Alamat : Jl. Balai Desa, Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **“Peran Forum Bangun Aceh (FBA) dalam Pemberdayaan Disabilitas di Aceh Besar”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 24 Juni 2021

Hormat Kami,


FBA
Peduli | Profesional | Dipercaya

Fakhurrrazi
Direktur Eksekutif FBA



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Ketua Laboratorium Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : **Dewi Chrismawati**
NIM : 160305040
Program : Sarjana (S.1)
Program Studi : Sosiologi Agama (SA)

Judul Skripsi: **PERAN FORUM BANGUN ACEH (FBA) DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI ACEH BESAR** dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal similarity 30%. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Banda Aceh, 23 Juni 2021

Kema,



Maizuddin

